

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DAN UPAYA
PENGENTASANNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Kasus di Daerah Lembah Code Yogyakarta)**



Oleh:

**Supriyadi, S.T.
NIM 2001021**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister dalam
Ilmu Ekonomi Islam
Yogyakarta
2002**



**Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia**

PERSETUJUAN

**TESIS Berjudul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN
DAN UPAYA PENGENTASANNYA DALAM
PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Kasus di Daerah Lembah Code Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Supriyadi, ST.

NIM : 2001021

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 September 2002

Pembimbing,

Drs. Edy Suandi Hamid, M.Ec.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No : 23/PS-MSI/ND/XI/2002

TESIS berjudul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DAN UPAYA
PENGENTASANNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi
Kasus di Daerah Lembah Code Yogyakarta)

Ditulis oleh : Supriyadi, S.T.

NIM : 2001021

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Nopember 2002

Ketua Program,

H. Amir Mu'allim, MIS



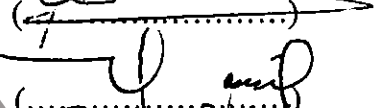
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Supriyadi, S.T.
Tempat/tgl.lahir : OKU, 28 September 1964
No. Peserta : 2001021
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DAN UPAYA
PENGENTASANNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi
Kasus di Daerah Lembah Code Yogyakarta)**

Ketua : Drs. Yusdani, MA.  (.....)

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA.  (.....)

Pembimbing : Drs. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.  (.....)

Penguji : 1. Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.  (.....)
2. Drs. H. Amir Mu'allim, MIS.  (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 9 Nopember 2002

Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

Hasil/Nilai : 86.67 A

Predikat : Dengan Pujian



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DAN UPAYA
PENGENTASANNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi
Kasus di Daerah Lembah Code Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Supriyadi, S.T.

NIM : 2001021

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam.



Yogyakarta, 18 November 2002

Ketua Program

UNIVERSITAS
ISLAM

Drs. H. Amir Mu'allim, MIS

INDONESIA

ABSTRACT

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DAN UPAYA PENGENTASANNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus di Daerah Lembah Code Yogyakarta)

Kemiskinan merupakan kondisi yang tidak disukai. Namun, kemiskinan itu seakan-akan menjadi fenomena yang tidak dapat dihilangkan. Program demi program telah diupayakan guna mengentaskan kemiskinan, akan tetapi kemiskinan tetap saja ada, bahkan jumlah masyarakat miskin dari waktu ke waktu semakin bertambah banyak.

Siapapun yang mengupayakan pengentasan kemiskinan haruslah mengetahui dahulu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kemiskinan tersebut. Tanpa mengetahui dengan pasti faktor tersebut, maka upaya pengentasan kemiskinan akan menemui kegagalan. Oleh karena itu upaya untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kemiskinan merupakan suatu keharusan dalam pengentasan kemiskinan.

Lokasi penelitian ini adalah di daerah Lembah Code Yogyakarta, yang meliputi 11 RT, yaitu RT 1, 2, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, dan 27 Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif dengan menitikberatkan pada metode kualitatif. Sedangkan analisis data menggunakan metode Induksi-Analitik-Mabda'i, yaitu analisis yang berangkat dari berbagai data yang bersifat khusus, kemudian disimpulkan menjadi ungkapan yang umum dengan selalu mengkaitkan dengan ideologi (Islam).

Jumlah kemiskinan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 42 %. Sedangkan kemiskinan di daerah Lembah Code mencapai 88,4 %. Dari jumlah tersebut, 51,7 % di antaranya dalam kondisi sangat miskin, yaitu dengan penghasilan kurang dari Rp 303.750,00 per bulan per keluarga. Meskipun 80 % masyarakat telah bekerja minimal 7 jam setiap hari, namun karena pekerjaan mereka 56,7 % adalah buruh dan 73,3 % hanya berpendidikan maksimal SMP, maka walaupun 58,3 % mereka selalu mencari pekerjaan yang lebih baik, namun mereka tetap saja miskin.

Kemiskinan yang terjadi bukan karena faktor tidak adanya produksi atau pun barang-barang yang dibutuhkan, namun lebih dikarenakan distribusi pendapatan yang timpang antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Demikian juga bukan karena masyarakat miskin tersebut malas bekerja. Namun hal yang lebih mendasar adalah karena kebijakan-kebijakan negara yang cenderung tidak adil, demikian juga struktur sosial-politik masyarakat yang tidak kondusif terhadap upaya agar masyarakat terlepas dari kemiskinan.

ABSTRACT

THE MAIN FACTORS OF POVERTY AND PROPOSING PROGRAM TO ELIMINATE POVERTY: AN ISLAMIC PERSPECTIVE (Case Study at Lembah Code Area Yogyakarta)

Poverty is an unpleasant condition. However, poverty seems like an unsolved phenomenon. Many programs have been done to eliminate poverty, but it still exists. Verily, there are more and more people who suffer it all this time.

Before we try to eliminate poverty, we should identify the main factors of poverty. If we can't recognize what the main factors really are, every program to eliminate poverty will be failed. Therefore, it is importance to analyze the main factors of poverty, so that we can introduce a reliable program to eliminate it.

This study took place on Lembah Code area in Yogyakarta, covers 11 RT which are RT 1, 2, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, and 27 of Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya Yogyakarta.

Research method that is used in this study is a combination of qualitative and quantitative method, which emphasizes on qualitative method. Meanwhile, data analyzing method employs Inductive-Analytic-Mabda'i method, that is a combination method which initiate from particular data to become a general expression by mabda' (ideology) of Islam as a guidance.

Poverty in Daerah Istimewa Yogyakarta is reach 42%, meanwhile in Lembah Code area is reach 88.4%. From this percentage, 51.7% among them is ranked to very poor condition, that is families with income less than Rp. 303,750,00 per month. Although 80% among them work at least 7 hours/day and 58.3% is always try to get better jobs, they still in deficiency. Because, 56.7% among them is unskilled worker and 73.3% is not well educated (SMP in maximum).

Poverty that happen in this case is not caused by the absence of production or goods, rather it is caused by unbalance distribution of income between the wealthy and the poor. Additionally, poverty is not cause by the laziness of the poor. Rather it is caused by state policies which tend to unfair, also social-politic structure of the community that unfavorable to any effort to eliminate poverty.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	h.	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta' Marbuṭ ahdi akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbuṭ ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	damamah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati تنسي	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

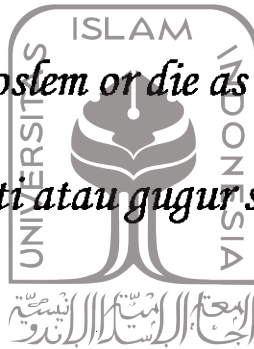
ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

عش كريماً او مت شهيداً

Be a good muslim or die as syuhada

(Jadilah muslim sejati atau gugur sebagai syuhada)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

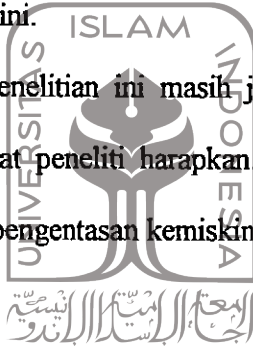
Puji syukur peneliti ucapkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya, semoga peneliti selalu berada dalam bimbingan-Nya. Salawat dan salam senantiasa peneliti tujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw., yang hanya dengan tuntunannya umat ini mampu menjadi umat yang mulia.

Tidak lupa pula peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam penelitian ini, baik berupa arahan, dorongan, maupun yang lainnya sehingga tesis yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DAN UPAYA SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus di Daerah Lembah Code Yogyakarta) ini dapat diselesaikan. Lebih khusus ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

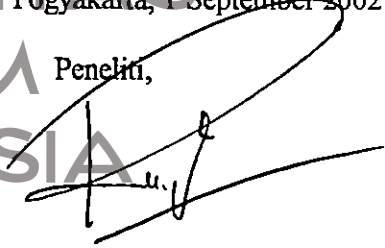
1. Bapak Drs. H. Amir Mu'alim, M.I.S., selaku ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Drs. H. Asmuni, M.A., selaku Kabid Akademik;
3. Bapak Drs. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyusunan tesis ini;
4. Bapak-bapak Dosen dan juga staf karyawan Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Sugiyanto, selaku Lurah Terban, yang telah memberikan berbagai informasi dan kemudahan dalam penelitian ini;

6. Teman-teman pengurus Masjid Al Mabruur Lembah Code, khususnya Mas Riyanto, Dimas, dan lain-lain yang telah banyak membantu dalam penyebaran angket;
7. Istri tercinta Nur Barozah, S.P., dan juga ananda Zahbiadina Latifah, yang telah memberikan dorongan, semangat, doa, sehingga tesis ini selesai; dan
8. Seluruh pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu per satu, yang telah berperan dalam penyusunan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.



UNIVERSITAS
Yogyakarta, 1 September 2002
ISLAM
Peneliti,
INDONESIA


Supriyadi, S.T.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
TIM PENGUJI	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Definisi Kemiskinan	7
B. Ukuran Garis Kemiskinan	9
C. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan	15
D. Upaya Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam	18
1). Keimanan sebagai Prinsip Dasar dalam Pemenuhan Kebutuhan	19
2). Sistem Ekonomi Islam	23
3). Jaminan Islam terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pokok	29
4). Tanggung Jawab Negara dalam Pengentasan Kemiskinan	35

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Tahap-tahap Penelitian	42
1) Tahap Pralapangan	43
2) Tahap Pekerjaan Lapangan	43
3) Tahap Analisis Data	50
BAB IV ANALISIS DATA	54
A. DATA	54
1) Data-data Sekunder	54
a) Pendapatan Keluarga	54
b) Jumlah Penduduk	59
2) Data-data Primer	60
a) Data Hasil Angket	60
(1). Jumlah Keluarga Miskin di Lembah Code	60
(2). Sikap Masyarakat terhadap Kondisi Kemiskinan yang Dihadapi	62
b) Data Hasil Wawancara	64
B. ANALISIS	70
(1) Kelemahan Pengukuran Kesejahteraan	70
(2) Kemiskinan dan Kepadatan Penduduk	72
(3) Kebudayaan Kemiskinan	75
(4) Perlindungan Negara Terhadap Rakyat	82
(5) Distribusi Kekayaan Dalam Sistem Ekonomi Islam	85
BAB V PENUTUP	98
A. Simpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	PDRB Kota Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku 54
Tabel 2	PDRB per Kapita Masing-masing Kecamatan se-Yogyakarta 55
Tabel 3	Rata-rata Pemasukan Rumah Tangga Yogyakarta Selama Satu Bulan 56
Tabel 4	Jumlah Keluarga Miskin DIY per Kabupaten/Kota 58
Tabel 5	Kepadatan Penduduk dan Jumlah Kemiskinan 59
Tabel 6	Pendapatan Keluarga Rata-rata per Bulan di Lembah Code 60
Tabel 7	Jenis Pekerjaan Responden 61
Tabel 8	Tingkat Pendidikan Responden 61
Tabel 9	Lama Jam Kerja dalam Sehari 62
Tabel 10	Upaya Mencari Pekerjaan yang Lebih Baik 63
Tabel 11	Aktivitas Ibadah Keagamaan 64

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Distribusi Pendapatan Keluarga Kota Yogyakarta..... 57
Gambar 2	Persentase Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I..... 58
Gambar 3	Gambaran Kondisi Masyarakat Code..... 77
Gambar 4	Lingkaran Kemiskinan (<i>Vicious Circle of Poverty</i>)..... 78



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang terkenal kaya dengan sumber daya alamnya, tidak menjadikan seluruh rakyatnya mampu menikmati hasilnya. Cadangan minyak Indonesia sebesar 10,8 milyar barel, dengan produksi tidak kurang dari 1,3 juta barel per hari. Cadangan gas alam sebesar 3 trilyun m³.¹ Demikian juga hutan mampu menghasilkan \$ 7 milyar per tahun.² Namun, semua itu tidak menjadikan rakyat Indonesia sejahtera, bahkan jumlah rakyat miskin semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat biasanya diukur dari besarnya pendapatan per kapita negara tersebut. Pada tahun 1997, sebelum krisis ekonomi, Indonesia masih mempunyai pendapatan per kapita per tahun sebesar \$ 318. Namun, setelah krisis pada tahun 1998, pendapatan per kapita turun drastis menjadi hanya sebesar \$ 162.³

Jumlah penduduk miskin pada tahun 1996 sebesar 34,5 juta jiwa atau sebesar 17,6 %, setelah krisis tahun 1998 meningkat menjadi 49, 5 juta jiwa

¹ Suroso Imam Zadjuli, *Mencari Mekanisme Ideal Pencabutan Subsidi BBM*, Surabaya: tp., 2001, hal. 5

² *Harian Kompas*, 21 Februari 2001

³ Suroso Imam Zadjuli, *Strategi Yang Tepat Untuk Mengembalikan Kepercayaan Negara-negara Sahabat Demi Memulihkan Perekonomian Indonesia Dengan Kebijakan Restrukturisasi Pembangunan Secara Total*, Surabaya: tp., 2001, hal. 12

atau sebesar 24,2 %, ⁴ bahkan pada tahun 2002 mencapai 100 juta jiwa atau sebesar 49 %. ⁵

Melihat fenomena-fenomena tersebut, Prof. Suroso menilai karena adanya salah pengelolaan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. ⁶ Lebih jauh Hizbut Tahrir Indonesia menganalisis bahwa penyebab utamanya adalah sistem pengaturan kehidupan ini yang bersifat sekularistik, yang memisahkan pengaturan negara dengan agama (Islam). Dari sistem yang sekularistik itu kemudian memunculkan peraturan-peraturan lain yang rusak, yaitu sistem ekonomi yang kapitalistik, budaya yang hedonistik (hura-hura) dan juga pendidikan yang cenderung materialistik. ⁷

Daerah Yogyakarta juga tidak luput dari pengaruh krisis ekonomi. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 1997 adalah Rp 1.458 milyar. Namun setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 PDRB turun menjadi Rp 1.296 milyar. Bahkan pada tahun 2001 PDRB Yogyakarta baru sebesar Rp 1.392 milyar dan angka tersebut belum mampu melampaui PDRB sebelum krisis pada tahun 1997. ⁸ Ini berarti krisis ekonomi masih belum berakhir.

⁴ *Ibid.* hal. 10

⁵ Hizbut Tahrir Indonesia, *Selamatkan Indonesia Dengan Syari'ah*, WWW. Hizb-ut-Tahrir.org, 2002, hal. 2

⁶ Zadjuli, *Op. Cit.* hal. 6

⁷ Hizbut Tahrir Indonesia, *Op. Cit.* hal. 6

⁸ BPS Kota Yogyakarta Tahun 2001. PDRB dengan standar harga konstan.

Kemiskinan di Yogyakarta juga cukup tinggi, yaitu 40,6 %.⁹ Tentunya ini adalah angka yang tidak kecil untuk sebuah ukuran kemiskinan. Kemiskinan tersebar di berbagai daerah di Yogyakarta, namun ada juga daerah-daerah yang memang relatif miskin. Daerah tersebut dapat disebut sebagai *kantong kemiskinan*. Di antara daerah tersebut adalah Daerah Lembah Code.

Daerah Lembah Code merupakan daerah yang berada di sekitar aliran Sungai Code. Oleh karena itu, daerah tersebut sering dinamai dengan Lembah Code. Istilah Lembah Code atau juga dinamakan Bantaran Code dipopulerkan oleh Romo Mangoen Wijaya ketika dia tinggal di daerah tersebut pada tahun 1980-1986.¹⁰ Daerah Lembah Code merupakan daerah yang dikenal relatif kumuh dan miskin dalam pengertian perumahan yang berhimpit-himpitan dan tampak tidak teratur, kondisi perumahan yang sangat sederhana, dan sering banjir karena luapan sungai Code. Rata-rata penduduknya bekerja sebagai buruh harian, tukang becak.

Kemiskinan yang ada harus segera diatasi. Namun, sebelum menentukan bagaimana mengentaskan kemiskinan tersebut, maka harus diketahui penyebab utamanya, sehingga solusi yang diambil nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Untuk itulah peneliti melakukan penelitian di daerah Lembah Code ini.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah perkampungan yang terletak di

⁹ BKKBN Yogyakarta Tahun 2001

¹⁰ M. Purwanta, Pr., *Romo Mangoen Imam Bagi Kaum Kecil*, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hal. 15. Lihat juga Harian Kompas tgl. 30 Mei 2002, Sekretaris Propinsi DIY Ir. Bambang Susanto Priyohadi, MPA. menyebut kawasan tersebut dengan batasan daerah mulai dari Ring Road Utara, mengikuti aliran Sungai ke Selatan, sampai daerah sekitar Jembatan Gondolayu Yogyakarta.

Lembah Code Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Daerah penelitian mencakup 11 RT, yang terbagi ke dalam RW 01 yang meliputi RT 01 dan RT 02; RW 04 yang meliputi RT 17, 18, 19, 20; RW 05 yang meliputi RT 23, 24, 25; dan RW 06 yang meliputi RT 26, 27 (Peta terlampir).

Dipilihnya daerah ini karena Lembah Code terbilang berada di tengah kota Yogyakarta, yaitu dekat dengan Tugu Yogyakarta, pertokoan Jl. Jend. Sudirman (Jl. Solo) dan juga dekat dengan Jl. Mangkubumi, Jl. Malioboro. Hal ini menarik peneliti karena daerah yang sangat dekat dengan keramaian kota, namun terdapat perkampungan yang relatif miskin.

B. Rumusan Masalah

Kemiskinan akan selalu terkait erat dengan penghasilan yang diperoleh keluarga, jenis pekerjaan yang diusahakan, dan etos kerja. Bahkan Oscar Lewis mengungkapkan bahwa pada masyarakat miskin mungkin juga terdapat kebudayaan kemiskinan (*culture of poverty*), yaitu suatu kebudayaan dalam pengertian antropologi tradisional. Ia mencerminkan suatu pola kehidupan, serangkaian penyelesaian yang siap pakai untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan karena itu ia menjelaskan fungsi adaptasi yang signifikan. Budaya kemiskinan ini bisa terlihat pada perilaku keseharian mereka yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu pada tingkat individu yang dicirikan dengan munculnya perasaan kurang berharga, tidak berdaya, ketergantungan, dan rendah diri. Pada tingkat keluarga dicirikan dengan masa anak-anak yang pendek, kurangnya hak-hak

individu.¹¹ Namun demikian, bukan berarti bahwa penyebab kemiskinan pasti karena adanya kebudayaan kemiskinan tersebut. Faktor-faktor lain seperti struktur ekonomi-sosial-politik mempunyai peran yang sangat besar sehingga terjadi kemiskinan di masyarakat.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Berapa besar tingkat kemiskinan yang ada di daerah sekitar Lembah Code, apakah dia merupakan kemiskinan yang begitu parah (*destitute poverty*) atau kemiskinan yang sudah mulai terentaskan (*near poverty*) ?
2. Bagaimana sikap dan tanggapan mereka terhadap kondisi yang mereka hadapi ?
3. Bagaimana aktivitas keagamaan mereka di tengah-tengah kondisi ekonomi yang mereka hadapi ?
4. Apa faktor utama yang menyebabkan kemiskinan tersebut ? Apakah karena faktor sosio-kultural, alami, atau bahkan struktural ?
5. Bagaimana kaitannya antara kemiskinan yang ada dengan teori ekonomi Islam ?
6. Solusi apa yang dapat ditawarkan guna menyelesaikan problem kemiskinan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan cara yang tepat dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Daerah Lembah Code menurut perspektif Islam.

¹¹ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995, hal. 17

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti, baik berupa pemikiran maupun tindakan kepada masyarakat Lembah Code khususnya dan juga pihak-pihak lain yang terkait, sehingga dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan di daerah yang bersangkutan atau bahkan di daerah lain.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini akan diberikan gambaran secara global penelitian ini, yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.

Bab II, Landasan Teori. Dalam bab ini dimuat dasar-dasar teori tentang kemiskinan dan berbagai kondisi yang melingkupinya. Di sini juga akan dipaparkan fakta-fakta empirik lainnya yang secara global menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dasar inilah yang nantinya akan dijadikan acuan untuk pengambilan data di lapangan dan analisis.

Bab III, Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang dipakai dan tahap-tahap penelitian. Penulis sengaja memasukkan metode penelitian dalam bab tersendiri dengan tujuan agar mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.

Bab IV, Analisis Data.

Bab V, Simpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu, definisi kemiskinan sangat bervariasi, bergantung pada latar belakang dan dari sisi mana seseorang melihat hal tersebut. Ada yang menitikberatkan pada kebutuhan dasar, seperti definisi Imam Syafi'i. Beliau mendefinisikan kemiskinan sebagai orang yang hanya mampu memenuhi separuh dari kebutuhannya.¹² Habil Subhi Ath-Thawil mendefinisikan sebagai tiadanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok.¹³ Secara lebih luas, Wolf Scott dalam *Development and Change* menjelaskan kemiskinan, yaitu: *Pertama*, kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang, ditambah dengan keuntungan-keuntungan nonmaterial yang diterima seseorang. Kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang dibutuhkan. *Kedua*, kadang-kadang kemiskinan didefinisikan dari segi kurang atau tidak memiliki aset-aset seperti tanah, rumah, peralatan, emas, kredit, dan lain-lain. *Ketiga*, kemiskinan nonmaterial, meliputi berbagai macam kebebasan, hak memperoleh pekerjaan

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999, hal. 190-191

¹³ Nabil Subhi Ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, Bandung: Mizan, 1985, hal. 36

layak, hak atas kehidupan layak.¹⁴ Herbert J. Gans menyebutkan bahwa kaum miskin adalah penduduk yang secara ekonomi dan politik menderita kekurangan dan beberapa nilai, serta patologi mereka merupakan hasil adaptasi terhadap situasi di mana mereka hidup.¹⁵

Bank Dunia juga memasukkan beberapa faktor dalam kemiskinan, seperti pendapatan yang rendah, kekurangan gizi, keadaan kesehatan yang buruk, dan pendidikan yang rendah.¹⁶

Dalam kemiskinan, dikenal istilah kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang ditinjau dari sisi tidak terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari. Ahluwalia mendefinisikan sebagai suatu keadaan ketika tingkat pendapatan absolut dari seseorang tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok seperti papan, sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan.¹⁷ Adapun yang dinamakan dengan kemiskinan relatif yaitu kemiskinan dalam arti yang lebih luas. Di sini kemiskinan tidak hanya ditinjau dari sisi kebutuhan pokok saja, namun juga kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan hak-hak politik.

Adi Sasono mengungkapkan bahwa kemiskinan tidak cukup hanya diterangkan sebagai realitas ekonomi saja. Ia tidak sekadar gejala keterbatasan

¹⁴ Andre Bayo Ala, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hal. 5

¹⁵ Suparlan, *Op. Cit.* hal. 45

¹⁶ *Ibid.*, hal. 6

¹⁷ Thee Kian Wie (penyunting), *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan*, Jakarta: LP3ES, 1983, hal. 6

lapangan kerja, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Namun, ia menjadi realitas sistem/struktur dan tata nilai kemasyarakatan.¹⁸

Selain ukuran-ukuran kemiskinan di atas yang lebih bersifat kualitatif, ada juga beberapa upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dengan batas-batas kuantitatif, sehingga dapat diukur sejauh mana tingkat kemiskinan yang ada di masyarakat. Namun demikian, penentuan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif tidaklah menjamin fakta kemiskinan yang sebenarnya. Hanya saja hal ini diambil guna memudahkan dalam pengukuran.

B. Ukuran Garis Kemiskinan

Penentuan berapa besar ukuran batas garis kemiskinan bukanlah pekerjaan yang mudah. Setiap ahli bisa jadi mengungkapkan metode yang berbeda-beda dalam mengukur kemiskinan. Latar belakang ahli tersebut sangat mempengaruhi konsep tentang bagaimana mendefinisikan dan mengukur kemiskinan. Oleh karena itu, standar yang digunakan untuk mengukur juga berbeda-beda. Namun demikian, ukuran-ukuran yang diajukan berupaya untuk mendekati fakta yang sebenarnya.

Beberapa batasan kuantitatif garis kemiskinan adalah:

1) Batasan yang diajukan Prof. Sayogya

Beliau memberikan batasan dengan mengacu pada minimal jumlah kalori yang dibutuhkan per orang, yang kemudian disetarakan dengan

¹⁸ Adi Sasono, "Masalah Kemiskinan dan Fatalisme, dalam Sri Edi Swasono, dkk, (Penyunting), *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*., Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999, hal, 38.

jumlah beras. Sayogya membagi kemiskinan menjadi tiga tingkatan, yaitu “miskin”, “miskin sekali”, dan “paling miskin”.

TABEL 1
TABEL KEMISKINAN MENURUT PROF. SAYOGYA¹⁹

No.	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Konsumsi (beras) per kapita per tahun	
		Desa	Kota
1.	Miskin	320 kg	480 kg
2.	Miskin Sekali	240 kg	360 kg
3.	Paling Miskin	180 kg	270 kg

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seseorang yang tinggal di kota akan dianggap miskin jika pendapatan per tahun kurang dari 480 kg beras. Dengan mengambil harga rata-rata *Beras Jawa (Java Rice)* pada tahun 2001, yaitu senilai Rp 2.700,00/kg²⁰, maka pendapatan seseorang yang dianggap miskin adalah:

$$480 \text{ kg} \times \text{Rp } 2.700,00/\text{kg} = \text{Rp } 1.296.000,00/\text{orang}/\text{tahun}; \text{ atau}$$

$$\text{Rp } 1.296.000,00 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 108.000,00/\text{bulan}/\text{orang}.$$

Dengan jumlah anggota keluarga di Indonesia yang rata-rata terdiri atas 5 orang tiap keluarga²¹, maka batas kemiskinan dari keluarga di kota adalah:

$$5 \times \text{Rp } 108.000,00/\text{bulan} = \text{Rp } 540.000,00/\text{bulan}/\text{keluarga}.$$

Dengan perhitungan yang sama akan didapatkan bahwa sebuah keluarga dikatakan paling miskin bila penghasilannya kurang dari Rp. 303.750,00/ bulan/keluarga.

¹⁹ Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999, hal. 17

²⁰ *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2001*, BPS Kota Yogyakarta, hal.237

²¹ Suroso Imam Zadjuli, *Anatomi Kemiskinan dan Perspektif Ekonomi*, Surabaya: tp. 1993, hal. 13

2) Batasan Bank Dunia

Bank Dunia memberikan ukuran garis kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita nasional, yaitu sepertiga dari pendapatan per kapita nasional.²² Pendapatan per kapita nasional Indonesia yang terukur dengan PDB per kapita nasional adalah sebesar US\$ 662 atau Rp 5.456.325,00 (dengan kurs 1 \$ = Rp 9.000,00).²³ Dengan demikian Garis Kemiskinan menurut Bank Dunia adalah: $\text{Rp } 5.456.325,00 : 3 = \text{Rp}1.818.775,00$ per tahun. Atau $\text{Rp}151.564,00/\text{bulan/orang}$. Dengan rata-rata anggota keluarga 5 orang, maka batas garis kemiskinan menurut Bank Dunia adalah: $5 \times \text{Rp } 151.564,00 = \text{Rp } 757.820,00/\text{bulan/keluarga}$. Jika dibandingkan dengan standar kemiskinan dari Prof. Sayogya, maka standar Bank Dunia mempunyai ukuran yang lebih tinggi.

3) Prof. Dr. Suroso Imam Zadjuli, S.E.

Prof. Suroso memberikan ukuran batas garis kemiskinan dengan mengacu pada kewajiban zakat emas, yaitu setara dengan 94 gr emas per tahun.²⁴ Wajib zakat biasanya kepala keluarga. Dengan harga emas tahun 2002 adalah Rp 75.000,00/gr, maka nishab zakat adalah $94 \text{ gr} \times \text{Rp } 75.000,00/\text{gr} = \text{Rp } 7.050.000,00$. Karena zakat ini dibayarkan satu kali dalam satu tahun, maka nilai setiap bulannya adalah $\text{Rp } 7.050.000,00 : 12 = \text{Rp } 587.500,00/\text{bulan/keluarga}$.

²² *Ibid.*, hal. 11

²³ Suroso Imam Zadjuli, *Prospek dan Kendala Ekonomi Indonesia*, Surabaya: tp. 2001, hal. 3

²⁴ Zadjuli, *Op. Cit.*, hal. 8

4). Ukuran Pemerintah

Pemerintah, dalam hal ini melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), menetapkan kriteria kemiskinan dengan batasan-batasan ekonomi dan juga nonekonomi.²⁵ Istilah yang digunakan juga lebih luas, yaitu dengan istilah keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III dan Sejahtera III+. Untuk keluarga Prasejahtera dengan alasan ekonomi dinamakan **Miskin Sekali**; sedangkan keluarga Sejahtera I dengan alasan ekonomi disebut keluarga **Miskin**.

Kriteria masing-masing tingkat kesejahteraan tersebut adalah:

a). Keluarga Prasejahtera (PS)

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari syarat-syarat keluarga Sejahtera I.

b). Keluarga Sejahtera I (S-I):

Ada dua indikator dalam kriteria Sejahtera I, yaitu:

(1). Alasan ekonomi:

- ◆ Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali dalam sehari atau lebih.
- ◆ Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian.
- ◆ Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.

²⁵ Diambil dari blangko Register Pendataan Keluarga yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta, 2001.

(2). Alasan nonekonomi:

- ◆ Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.
- ◆ Apabila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana kesehatan.

c). Sejahtera II (S-II)

Yaitu keluarga yang memenuhi kriteria Sejahtera I ditambah kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Paling kurang sekali dalam seminggu keluarga makan daging atau telur.
- Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni.
- Setahun terakhir keluarga memperoleh paling tidak satu stel pakaian baru.
- Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas atau fungsi masing-masing.
- Ada anggota keluarga umur 15 tahun berpenghasilan tetap.
- Anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.
- Anak umur 7 – 15 tahun bersekolah.
- Pasangan Usia Subur dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai kontrasepsi.
- Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur.

d). Sejahtera III (S-III).

Adalah keluarga yang memenuhi syarat S-II ditambah kriteria:

- Sebagian penghasilan keluarga ditabung.

- Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari dan dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- Keluarga berekreasi di luar rumah paling kurang sekali dalam 6 bulan.
- Keluarga memperoleh berita dari surat kabar/radio/tv/majalah.
- Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi setempat.
- Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.

Ukuran BKKBN tersebut dalam praktiknya sangat rumit, karena mengaitkan dengan faktor-faktor nonmateri, seperti ibadah, dan bahkan memasukkan kriteria keikutsertaan dalam Keluarga Berencana (KB). Dengan kriteria tersebut maka bisa jadi sebuah keluarga yang kaya raya secara materi namun tidak melakukan ibadah, maka keluarga tersebut tetap digolongkan dalam keluarga Prasejahtera.

Sebenarnya masih banyak lagi definisi-definisi kemiskinan dengan batasan yang berbeda-beda. Mencari batasan yang tepat tentang kemiskinan memang sukar, seperti diungkapkan Neils Mulder bahwa garis kemiskinan tersebut sukar didefinisikan, dan kebanyakan terpaksa berhenti pada definisi-definisi yang berkisar pada kecukupan makanan. Akan tetapi, patokan-

patokan kualitas makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain sebenarnya jauh lebih sukar didefinisikan.²⁶

Banyaknya definisi kemiskinan itu menunjukkan bahwa faktor-faktor kemiskinan itu sangatlah kompleks. Namun demikian, dari berbagai definisi yang ada peneliti mengambil pendapat Prof. Sayogya, yaitu bahwa seseorang disebut miskin jika pendapatan keluarga lebih kecil dari nilai yang setara dengan beras seberat 480 kg/tahun/kapita, atau lebih kecil dari Rp 540.000,00/bulan/keluarga

C. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi di masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah:

1. Alam

Kemiskinan terjadi karena alam yang ditempati masyarakat memang tidak memungkinkan untuk aktivitas ekonomi secara baik, misalnya, tandus, sulit dijangkau, rawan bencana alam, tidak mempunyai potensi alam, lokasi alamnya terisolasi dari daerah lain, dan lain-lain.

2. Kultural

Artinya kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat tersebut memang tidak mendukung majunya perekonomian. Misalnya, kultur “nrima”, mudah pasrah terhadap keadaan, anggapan bahwa harta adalah sesuatu yang harus dihindari, sikap mudah puas dengan apa yang sudah

²⁶ Neils Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 76.

didapat hari itu tanpa ada keinginan untuk maju lebih jauh, sehingga memunculkan sifat tidak kreatif dan inovatif, atau bahkan malas bekerja.

Kemiskinan yang terjadi sudah sekian lama di masyarakat akan menumbuhkan upaya-upaya untuk berbagi tanggung jawab kemiskinan antara satu dengan yang lain dalam masyarakat miskin itu sendiri (*shared poverty*). Dengan adanya proses *shared poverty* di kalangan massa miskin itu sendiri kemudian akan memunculkan kultur kemiskinan (*culture of poverty*).²⁷ Dari sinilah kemudian lingkaran kemiskinan terjadi terus-menerus, dan bahkan karena sudah merupakan budaya, maka kultur ini pun dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk beranjak dari kemiskinan yang sudah membudaya ini bukanlah sesuatu yang mudah, namun memerlukan usaha-usaha yang komprehensif dan kontinu.

3. Struktural

Prof. Selo Sumardjan mendefinisikan kemiskinan struktural sebagai kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat yang disebabkan oleh struktur masyarakat itu sehingga mereka tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.²⁸

Pada faktor struktural ini, kemiskinan lebih ditentukan oleh faktor-faktor :

- (a) Kekuasaan ekonomi yang tidak berimbang. Ekonomi hanya dikuasai oleh para konglomerat, pejabat-pejabat, dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.

²⁷ Swasono, *Op.Cit.*, hal. 38.

²⁸ Suparlan, *Op. Cit.*, hal. xiv.

- (b) Ketimpangan hubungan sosial ekonomi antara pusat dan daerah. Hal ini akan menjadikan daerah perkotaan menjadi jauh lebih makmur dan daerah pedesaan menjadi miskin.
- (c) Persaingan yang tidak seimbang antara daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dengan daerah sekitarnya yang tidak mempunyai faktor keunggulan komparatif (*disadvantage*).
- (d) Struktur kepemilikan yang cenderung tidak adil

o Pemilikan lahan

Dalam pemilikan lahan, di Indonesia telah terjadi secara besar-besaran dan terkonsentrasi pada beberapa pengusaha, baik industri real estate, industri perkebunan maupun kehutanan. Namun, di pihak lain masih banyak petani “gurem” yang memiliki lahan sangat sempit atau bahkan tidak memiliki lahan.

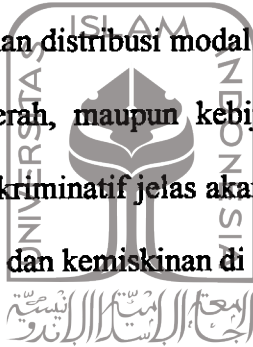
William Collier mengungkapkan bahwa penetrasi pertanian modern bukan saja telah menyebabkan meningkatnya jumlah buruh tani tidak bertanah dan menghancurkan pranata sosial komunitas desa yang tradisional, tetapi lebih jauh dari itu juga menambah beban kemelaratan golongan miskin desa dan mengakibatkan merebaknya polarisasi sosial di kalangan masyarakat desa.²⁹

²⁹ Bagong Suyanto, *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996, hal. xii.

o Pemilikan modal

Ketimpangan kepemilikan modal juga akan mendatangkan persoalan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, sekitar 60% dana dikuasai oleh orang pusat (Jakarta), Jawa Barat 6%, Jawa Tengah dan DIY 5,5 %, Jawa Timur 8%. Di Jawa saja sudah terkonsentrasi modal sebesar 79,5% dan sisanya didistribusikan ke daerah-daerah luar Jawa.³⁰

Kepemilikan dan distribusi modal yang tidak berimbang, baik antara pusat dan daerah, maupun kebijakan-kebijakan pemberian modal usaha yang diskriminatif jelas akan menjadikan kekayaan ada di daerah tertentu saja dan kemiskinan di daerah lain.



D. Upaya Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Kemiskinan yang terjadi di masyarakat tidak muncul begitu saja secara sendiri, namun berkait erat dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat itu. Karena masyarakat merupakan rangkaian yang saling terkait antara individu-individu (*al-afrād*) yang saling berinteraksi secara kontinu, dan interaksi yang kontinu itu terjadi karena adanya satu-kesatuan pemikiran (*al-afkār*) dan perasaan (*al-masyā'ir*) yang kesemuanya itu diikat dengan satu aturan (*al-anzīmah*),³¹ maka upaya pengentasan kemiskinan juga harus dilakukan

³⁰ Zadjuli, *Op. Cit.*, hal. 26.

³¹ Muhammad Husain Abdullah, *Mafāhim Islāmiyah*, Juz I, Beirut: Dārul Bayariq, 1994, hal. 115.

penataan dan perbaikan secara menyeluruh, baik dari individu, masyarakat maupun sistem sosial-ekonomi-politik yang melingkupinya.

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, tuntunan Islam memberikan urutan-urutan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipikul oleh masing-masing pihak, baik itu individu, keluarga, masyarakat maupun negara.

Prinsip, urutan dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Keimanan sebagai Prinsip Dasar dalam Pemenuhan Kebutuhan

Islam menempatkan pemanfaatan segala sesuatu yang ada selalu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah. Allah berfirman:

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا

“Dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu” (QS. Al-Baqarah [2]: 29).³²

Ayat itu mengajak agar selalu mengaitkan pemanfaatan dengan pencipta rizki yaitu Allah. Hal ini berarti selalu ada kesadaran makhluk terhadap Khaliq-Nya.

Demikian juga firman Allah:

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniamu” (Q.S. Al Qaşaş [28]: 77).³³

Islam membentangkan serta menerangi jalan di hadapan manusia, agar ia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan pokok (*al-darūriyah*), maupun pelengkap (*al-kamāliyah*). Namun, perlu

³² Depag R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hal. 13

³³ *Ibid.*, hal. 623

ditegaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan tadi hanyalah sarana kehidupan, bukan tujuan hidup itu sendiri.³⁴

Namun demikian, pengentasan kemiskinan tidak semata-mata dapat diatasi hanya dengan kebangkitan di sektor ekonomi saja, karena hal itu terkait juga dengan sosial politik dan lain-lain. Oleh karena itu, secara lebih mendasar solusi problematika umat, termasuk problem kemiskinan, harus dimulai dengan kebangkitan umat. Kebangkitan yang mendasar yang mampu membangkitkan sektor-sektor lainnya adalah kebangkitan pemikiran yang menyeluruh (*Fikrah Kulliyah*), yaitu dimulai dengan cara membongkar pemikiran mendasar (akidah) kaum muslimin agar memiliki akidah yang tercerahkan. Dengan akidah yang bersih ini kemudian dibangun seluruh pemikiran-pemikiran cabang di atasnya.³⁵ Dengan adanya kebangkitan yang mendasar atau disebut juga kebangkitan yang bersifat ideologis, maka akan terjadi kebangkitan yang lain, seperti ekonomi, teknologi, termasuk juga kebangkitan politik.

Hal itu penting disadari karena mengupayakan tercapainya kesejahteraan, yang salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok, pastilah melibatkan banyak faktor, baik persoalan ekonomi itu sendiri, sosial, maupun struktur politik yang ada.

Dalam sistem yang kapitalistik, upaya pengentasan kemiskinan adalah suatu 'omong kosong'. Muhammad Hatta mengkritik secara *pedas*

³⁴ Abdul Aziz al-Badri, *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hal. 4.

³⁵ Abdurrahman al-Baghdadi, *Umatku Bangkit Bersatulah Kembali*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hal. 17-19.

sistem ekonomi yang ditata secara kapitalistik. Hatta mengatakan: “Dengan meneruskan sistem *laissez faire* dengan semangat *free enterprise*, cita-cita untuk menghapus kemiskinan rakyat terang tidak akan tercapai. Sistem itu hanya akan menjadikan yang kaya bertambah kaya, dan yang miskin bertambah melarat.”³⁶

Amien Rais mengatakan bahwa kapitalisme pada hakikatnya hanyalah suatu *by product* dari filsafat liberalisme, sehingga tuntutan spiritual dari lembaga agama apa pun tidak diperlukan lagi.³⁷ Bahkan Amien lebih rinci membeberkan kerusakan kapitalisme, yaitu:

1. Hanya akan melahirkan kesenjangan di masyarakat.
2. Kapitalisme mempertahankan hidupnya dengan eksploitasi terhadap dunia ketiga.
3. Selalu bersikap *double standard* dengan tujuan yang satu, yaitu *profit*.
4. Secara teori kapitalisme memberikan konsep yang sama (*equality of opportunity*), tetapi dalam kenyataannya justru pasti diskriminasi.
5. Prinsip *to produce, to produce and to produce* mengakibatkan keserakahan dan berkembangnya kehidupan yang materialistik.
6. Menciptakan konsumerisme masyarakat, sehingga terbentuk apa yang disebut dengan *throw away society* (masyarakat pembosan).

³⁶ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996, hal. 17

³⁷ Amien Rais, “*Kritik Islam Terhadap Kapitalisme dan Sosialisme*”, dalam Sri Edi Swasono., *Op. Cit.*, hal. 10.

7. Memunculkan gejala alienasi dalam masyarakat dan menjadikan individualistik.³⁸

Gunar Mirdal juga mengkritik sikap konsumerisme Barat dengan mengatakan bahwa tanpa perubahan yang radikal dalam pola konsumsi di negara-negara kaya, pembicaraan mengenai tata ekonomi baru adalah omong kosong.³⁹

Namun demikian, bukan berarti dengan terbuktinya kerusakan sistem kapitalisme akan mengajak kepada penerapan sistem sosialisme. Penerapan Sosialisme-Marxisme hanya akan melahirkan kebencian di antara kelas-kelas dalam masyarakat. Sosialisme-Marxisme melihat manusia sebagai sejenis barang (*a piece of merchandise*) yang dieksploitasikan dalam industri, pertanian, dan sektor-sektor lain.⁴⁰

Janji-janji dan slogan kapitalisme ataupun sosialisme sangat mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, L. Berger dalam *Piramida Korban Manusia* mengkritik janji-janji itu dengan mengatakan bahwa kebijaksanaan politik kapitalisme menyodorkan kelaparan pada waktu sekarang, sementara menjanjikan kemakmuran di hari esok. Janji ini harus dipertanyakan; sedang Sosialisme menyetujui teror pada waktu sekarang demi janji suatu tatanan yang manusiawi di hari esok. Ini juga harus dipertanyakan kebenarannya.⁴¹

³⁸ *Ibid.* hal. 14.

³⁹ Ala, *Op. Cit.*, hal. 35.

⁴⁰ Rais, *Op. Cit.* hal. 17.

⁴¹ Sanusi, *Op. Cit.*, hal. 32

Dari sana tampak jelas bahwa upaya pengentasan kemiskinan sangat erat hubungannya dengan pola sistem yang dikembangkan di negara tersebut. Untuk itu, pemakaian sistem yang sudah jelas kerusakannya tidak akan membuahkan hasil, bahkan akan memperpanjang permasalahan.

Sementara orang modern dapat melakukan berbagai inovasi dalam berbagai bidang, mulai teknologi pertanian, kedokteran, sampai dengan pesawat ruang angkasa, tetapi di bidang ekonomi ia seolah-olah tidak dapat melihat horizon lain kecuali kapitalisme dan sosialisme. Ini adalah sesuatu yang sangat ironis. Oleh karena itu, pengambilan sistem Islam, khususnya sistem ekonomi, dalam pengentasan kemiskinan adalah satu-satunya pilihan.



2) Sistem Ekonomi Islam

Upaya pengentasan kemiskinan terkait erat dengan sistem sosial-politik yang diterapkan di masyarakat, termasuk juga sistem ekonominya. Sistem Ekonomi Islam ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu: kepemilikan (*tamlīk al-māl*), pemanfaatan kepemilikan (*taṣarruf fī al-milkiyah*), dan konsep distribusi kekayaan (*tauḏī'u as-ṣarwah*).⁴²

(1) Konsep kepemilikan

Kepemilikan dibagi lagi menjadi tiga kelompok kepemilikan, yaitu:

(a) Kepemilikan individu (*private property*)

⁴²Taqiyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Bangil: Risalah Gusti, 1996, hal. 61. Lihat Juga Yusanto, *Op. Cit.* hal. 200.

Yaitu izin syara' pada individu untuk memanfaatkan sesuatu. Ada lima sebab dalam pemilikan individu, yaitu bekerja, warisan, keperluan terhadap harta guna mempertahankan hidup, pemberian negara, dan harta pemberian lainnya seperti waris, hibah. Contoh-contoh kepemilikan individu adalah seperti rumah, makanan, pakaian, dan lain-lain.

(b) Kepemilikan Umum (*Collective Property*)

Definisi harta milik umum adalah seluruh harta yang secara izin *asy-syāri'* (Allah) seluruh komunitas berhak memanfaatkannya. Adapun benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum mempunyai tiga ciri, yaitu:

- ❖ Sesuatu yang merupakan fasilitas umum, yaitu kalau tidak ada sesuatu itu di dalam suatu komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya.

Rasulullah menjelaskan hak milik umum tersebut. Sabda Rasul:

المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار

"Kaum muslimin berserikat dengan tiga hal, yaitu air, padang gembalaan, dan api" (HR. Abu Dawud).⁴³

Dalam hal ini terdapat dalil bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air, padang gembalaan, dan api. Hanya saja, dengan memperhatikan hadis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya yang dimaksud bukan hanya tiga

⁴³ *Ibid.* hal. 237

benda itu saja, namun apa saja yang mempunyai kesamaan prinsip (*'illah*), yaitu sebagai kebutuhan umum, maka sesuatu itu menjadi milik umum. Termasuk dalam kepemilikan umum ini adalah hutan.⁴⁴

❖ **Bahan tambang yang jumlahnya sangat banyak**

Semua bahan tambang yang jumlahnya sangat banyak adalah milik umum (rakyat), bukan milik negara. Seperti minyak, batu bara, dan lain-lain. Negara hanya mengelola saja, tidak memiliki, dan ini tidak boleh dimiliki oleh individu atau swasta.⁴⁵ Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abyad bin Hammal, bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah untuk mengelola tambang garamnya, kemudian Rasulullah yang memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya kepada Rasul:

“Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang engkau berikan kepadanya? Sungguh engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir.” Rasulullah kemudian bersabda: *“Tariklah tambang itu darinya”* (HR. Tirmidzi).⁴⁶

Yang dimaksud dengan bagaikan air mengalir adalah jumlah cadangannya sangat banyak. Dengan diketahuinya hal tersebut, kemudian Rasulullah menariknya kembali. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh barang tambang yang jumlahnya

⁴⁴ Ismail Yusanto, *Islam Ideologi*, Bangil: Al-Izzah, 1998, hal. 198.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 201

⁴⁶ An Nabhani, *Op. Cit.* hal. 239

sangat banyak adalah menjadi milik umum. Setiap orang berhak atas kepemilikan umum tersebut.

Karena seluruh anggota masyarakat berhak atas hak milik umum tersebut, maka dalam pengelolaannya harus dikelola oleh negara. Namun, negara sifatnya hanya sebagai pengelola saja, bukan pemiliknya, sedangkan pemiliknya adalah rakyat semua.

Dengan demikian, masyarakat berhak memiliki barang tambang tersebut secara gratis, atau dengan harga yang murah, karena barang itu memang miliknya.

- ❖ Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi seseorang untuk memiliki secara perseorangan.

Contoh dalam kepemilikan ini adalah jalan, sungai, danau, laut, lapangan, dan rumah sakit milik negara.⁴⁷

(c) Harta milik negara

Harta kepemilikan negara adalah izin *syara'* atas setiap harta yang pemanfaatannya berada di tangan Khalifah sebagai kepala negara. Misalnya, harta *ganimah*, *fa'i*, *khumus*, *kharaj*. Harta tersebut dapat diberikan atau digunakan oleh orang yang diberi oleh Khalifah. Seorang Khalifah boleh mengalokasikan hak milik negara

⁴⁷*ibid.* hal. 241

tersebut sesuai dengan ijtihadnya. Hal ini berbeda dengan kepemilikan umum.

(2) Pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan (*Taşarruf wa Tanmiyah Al-Māl*)

Apabila harta tersebut telah menjadi miliknya secara hukum *syara'*, maka sebagai konsekuensinya benda itu adalah boleh dimanfaatkan. Akan tetapi, pemanfaatan sesuatu itu tetap terikat dengan izin Allah, dan tidak boleh dimanfaatkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan *syara'*. Misalnya, digunakan untuk maksiat, suap, dan lain-lain.

Demikian juga dalam pengembangan kepemilikan harus terikat dengan hukum, karena pengembangan kepemilikan berkaitan erat dengan kepemilikan, yang kesemuanya itu adalah izin Allah.

Sebenarnya ada perbedaan antara pengembangan harta dan pengembangan kepemilikan. Pengembangan harta berkait erat dengan teknis (*uṣṭūb*) memperbanyak harta/benda tadi. Bisa jadi dengan memproduksinya atau membudidayakan, dan lain-lain. Adapun pengembangan kepemilikan berkait dengan pemindahan, atau penambahan atas hak milik. Hal ini berarti terkait erat dengan muamalah, seperti sewa-menyewa ataupun jasa (*ijārah*), perdagangan (*bai'*), dan lain-lain. Inilah yang menjadi pembahasan dalam hukum Islam, dan bukan dalam teknik produksi barang atau budidaya.⁴⁸ Tidak

⁴⁸*Ibid.*, hal. 128.

diizinkan melakukan pengembangan kepemilikan dengan cara judi, riba, atau juga mencuri.

(3) Distribusi

Pilar distribusi menjadi pilar yang sangat berperan dalam pengentasan kemiskinan, karena secara riil bahwa kemiskinan yang terjadi selama ini bukan karena faktor tidak adanya barang atau produksi, namun lebih disebabkan oleh ketimpangan distribusi. Bagong Suyanto mengungkapkan adanya kesan bahwa hasil-hasil pembangunan selama ini lebih banyak dinikmati oleh lapisan tertentu saja, sehingga menimbulkan kesenjangan. Bahkan kesenjangan itu bukan lagi antara kaya dan miskin, namun telah meluas menjadi kesenjangan antara kota dan desa.⁴⁹ Oleh karena itu, negara mengupayakan semaksimal mungkin agar terwujud distribusi kekayaan di masyarakat.

Distribusi atau pemerataan yang dinilai adil menurut Dr. Ziauddin Ahmad adalah dicirikan oleh adanya :

- Jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat.
- Adanya pemerataan pendapatan.⁵⁰

Distribusi pendapatan di antaranya dilakukan melalui:⁵¹

- Pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal bagi yang sangat memerlukan.
- Mengupayakan adanya pendidikan, kesehatan bebas bea.
- Pembagian harta waris.

⁴⁹ Suyanto, *Op. Cit.* hal. xi.

⁵⁰ Ziauddin Ahmad, *Al Qur'an, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima, 1998, hal. 2.

⁵¹ Yusanto, *Op. Cit.*, hal. 203-204.

- Larangan adanya kecurangan dalam perekonomian, seperti penimbunan, praktik ekonomi riba.
- Menekankan pada aktivitas ekonomi riil.
- Adanya kewajiban zakat.
- Hak setiap warga negara untuk memanfaatkan pemilikan umum. Negara hanya berhak mengelola dan kemudian mendistribusikannya kepada rakyat secara cuma-cuma atau dengan harga yang murah.

3). Jaminan Islam terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Syariat Islam telah menetapkan beberapa hukum yang berperan untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan pokok. Pemenuhan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Tahap-tahap tanggung jawab itu adalah :

- a). Islam memerintahkan kepada setiap individu untuk bekerja.

Bekerja diwajibkan oleh Islam kepada kaum laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga, atau kaum laki-laki yang memiliki tanggungan nafkah atas keluarga ataupun orang yang ditanggungnya.

Oleh karena itu, melalaikan tanggung jawab ini merupakan perbuatan dosa, sama seperti melalaikan kewajiban shalat, zakat, atau yang lainnya.

Allah berfirman :

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segenap penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizki-Nya” (QS. Surat Al-Mulk [67]: 15).⁵²

Demikian juga dalam firman yang lain:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار
والدة بولدها ولا مولود له بولده

“Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).⁵³

Ayat ini mendorong manusia untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, baik kebutuhan pokok (*aḍ-ḍarūriyah*) maupun kebutuhan pelengkap (*kamāliyah*). Ayat-ayat tersebut dengan gamblang menunjukkan kewajiban atas para suami/ayah terhadap orang-orang yang ditanggungnya, agar orang-orang itu tercukupi kebutuhan pokoknya.

Begitu juga seorang laki-laki wajib menjamin dan bertanggung jawab terhadap ayah ibunya, jika mereka berdua dalam keadaan kekurangan atau sudah tidak mampu lagi menghidupi diri mereka

⁵² Depag R.I., *Op. Cit.* hal. 956

⁵³ *Ibid.* hal. 57

sendiri. Rasulullah bersabda kepada seorang laki-laki yang bertanya mengenai persoalan ini.

انت ومالك لأبيك

“Kamu dan hartamu adalah untuk bapakmu”
(HR. Ibnu Majah).⁵⁴

Jika dijumpai orang-orang yang mengabaikan kewajiban nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, padahal ia mampu, maka negara dalam hal ini berhak untuk memaksanya agar memberikan nafkah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Bahkan negara dalam hal ini tidak berlaku pasif dan menyerahkan urusan ini kepada masing-masing individu. Perhatikanlah bagaimana sikap dan tindakan negara di masa Umar bin Khaththab. Suatu hari ia memasuki masjid di luar waktu shalat lima waktu, dan beliau menjumpai dua orang yang tengah berdoa kepada Allah swt. kemudian beliau bertanya: “Apa yang sedang kalian kerjakan berdua, sementara orang-orang tengah sibuk-sibuknya bekerja?” Mereka menjawab: “Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tawakkal kepada Allah swt.” Mendengar jawaban itu, Umar menjadi marah seraya berkata: “Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak.” Kemudian Umar mengusir mereka keluar dari masjid, sambil memberikan kepada mereka setakar

⁵⁴ Al Badri, *Op. Cit.* hal. 29

biji-bijian dan kemudian berkata kepada mereka: “Tanamlah dan bertawakallah kepada Allah.”

Dari sini dapat dipahami bahwa pemerintah wajib memberikan dan menyediakan sarana-sarana pekerjaan kepada para pencari kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban negara, dan ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat (*ri'āyah asy-syu'ūn li al-ummah*).⁵⁵ Itulah kewajiban pertama yang diputuskan oleh syariat Islam, yang dipelihara, dijaga, dan diterapkan oleh negara di masa Daulah Khilafah Islamiyah sehingga berada di puncak kejayaannya. Oleh karena itu, negara wajib menyediakan lapangan kerja yang mencukupi seluruh jumlah para pencari kerja, agar tingkat pengangguran dapat ditekan serendah mungkin agar setiap laki-laki yang wajib bekerja dapat mencukupi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan hidup orang yang ditanggungnya.

b). Kewajiban kerabat

Apabila seorang individu tidak mampu bekerja, mungkin karena cacat atau sakit ataupun tua, dan tidak mampu mencukupi nafkah atas orang-orang yang ditanggungnya, meskipun ia sudah bekerja, maka Islam mengalihkan kewajiban nafkah itu dengan membebankan kepada para kerabatnya. Seorang anak, dalam hal ini bertanggung jawab terhadap ibu bapaknya, seorang kakak bertanggung

⁵⁵Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil: Al Izzah, 1996, hal. 78.

jawab terhadap adik-adiknya, dan seorang adik (laki-laki) atas kakaknya (perempuan), seorang paman (dari ayah) atas kemenakannya, dan seterusnya.

Dalam lingkup masyarakat, Islam mewajibkan dan mendorong orang-orang kaya untuk menyantuni orang miskin yang tidak mampu, siapa pun orang-orang miskin itu. Sebagaimana firman Allah:

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

“Dan pada harta-harta mereka terdapat hak untuk orang-orang yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian” (QS. Az-Zariyat [51]: 19).⁵⁶

Di samping itu, Islam memberikan pujian yang amat tinggi, serta kedudukan yang mulia terhadap orang-orang yang memberikan sadaqah, infak, hibah, wakaf terhadap orang-orang yang tidak mampu.

Firman Allah swt.

إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

“Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Akan tetapi, jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah pasti menghapus kesalahan-kesalahanmu” (QS. Al-Baqarah [2]: 271).⁵⁷

Tetangga juga mempunyai kewajiban atas tetangganya yang kekurangan. Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis Qudsi:

⁵⁶ Depag R.I., *Op. Cit.* hal. 859

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 68

ما امن بي ما امن بي ما امن بي من بات شعبان وجاره جاع وهو يعلم
“Tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku, orang yang pada malam hari tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan dan dia mengetahui hal tersebut” (HR. Al-Bazzar).⁵⁸

Dengan demikian, tanggung jawab masing-masing kaum muslimin terhadap kemiskinan adalah tanggung jawab yang pasti. Dari sana dituntut kepedulian terhadap sesama saudaranya, bahkan kepedulian itu digambarkan oleh Rasulullah saw. seperti pedulinya bagian tubuh yang satu terhadap bagian tubuh yang lain dalam satu tubuh.

Rasulullah bersabda :

مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

“Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta, kasih dan kelembutan hati mereka adalah bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka menjalarlah rasa sakit itu ke seluruh tubuh hingga tidak dapat tidur dan demam (HR. Bukhari, Muslim dari Nu'man bin Basyir ra.).⁵⁹

Namun demikian perlu diingat bahwa kemiskinan yang sifatnya individual masih dapat diselesaikan dengan upaya-upaya yang bersifat individual pula seperti yang ditekankan oleh Rasulullah saw. di atas. Akan tetapi, apabila kemiskinan itu terjadi dalam jumlah yang besar dalam masyarakat, maka hal ini sudah merupakan problem sosial dan

⁵⁸ Al Badri, *Op. Cit.* hal. 50

⁵⁹ *Ibid.* hal. 20

solusinya pun harus bersifat sosial pula, yaitu dengan penanganan secara struktural.⁶⁰

Di sinilah peran negara dalam melakukan perubahan struktural dan hal ini tidak dapat diselesaikan secara individual oleh orang per orang.

4). Tanggung jawab Negara dalam Pengentasan Kemiskinan

Negara bertanggung jawab secara langsung terhadap kebutuhan pokok (papan, sandang, dan pangan) dari seluruh warga negara yang secara riil tidak mampu dan sangat membutuhkan.⁶¹

Negara dalam perspektif Islam berfungsi untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam secara totalitas dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.⁶² Penerapan hukum dalam sistem pemerintahan Islam meliputi seluruh aspek, termasuk sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain.

Secara umum, negara dalam hal ini adalah Imam atau khalifah, bertanggung jawab terhadap persoalan rakyat secara keseluruhan. Rasulullah saw. bersabda :

الإمام راع وهو مسئول عن رعيتہ

“Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap tanggung jawabnya itu” (HR. Bukhari, Muslim).⁶³

⁶⁰Jalaludin Rakhmat, *Rekayasa Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999, hal. 72.

⁶¹Ir. Muhammad Riza Rosadi, MMA, *Kehidupan Ekonomi dalam Daulah Khilafah*, dalam *Jurnal Politik dan Dakwah*, Al Wa'ie No. 9 Tahun I Mei 2001.

⁶²Taqiyuddin An Nabhani, *Nizham Al Hukm fi Al Islam*, Cet. IV, Beirut: Dar Al Umah, 1996, hal. 36.

⁶³Al Badri, *Op. Cit.* hal. 27

Dalam sistem Ekonomi Islam, An Nabhani mengungkapkan bahwa tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak hanya dengan pemberian langsung kepada yang membutuhkan, namun lebih dari itu adalah bagaimana menciptakan sistem perekonomian yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.⁶⁴

Tanggung jawab seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya adalah kewajiban pertama bagi individu tersebut. Namun, jika dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka tanggung jawab juga menjadi tanggung jawab sanak kerabatnya. Jika dengan hal itu pun sanak kerabatnya tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, maka tanggung jawab beralih ke negara melalui *Bait Al-Māl*. Wajib atas *Bait Al-Māl* untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya, sebab memang demikianlah fungsi *Bait Al-Māl* menanggung orang-orang yang lemah dan membutuhkan. Pemberian bantuan secara langsung oleh negara itu dilakukan jika seseorang tersebut dinilai tidak mampu melakukan aktivitas usaha atau tidak tercukupinya kebutuhan pokoknya.

Rasulullah bersabda:

فَأَيُّمُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِّثْهُ عَصْبَتُهُ مِنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنِي
وَأَنَا مَوْلَى هـ

"Jika seorang mukmin mati dan meninggalkan harta waris, silakan orang-orang berhak mendapat waris untuk mengambilnya. Akan tetapi, jika ia mati meninggalkan hutang atau orang-orang yang terlantar, maka hendaklah mereka datang kepadaku, sebab aku adalah penanggungjawabnya."

(Dishahihkan oleh Imam yang enam).⁶⁵

⁶⁴ An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Op. Cit., hal. 52.

⁶⁵ Al Badri, Op. Cit. hal. 31

Demikianlah, negara harus berbuat sebesar-besarnya untuk mewujudkan kemaslahatan, dan membantu individu yang tidak mampu untuk menikmati kemaslahatan itu. Tindakan negara (Khalifah) yang demikian tidak lain adalah sebagai kepatuhan kepada Allah. Allah telah memuliakan manusia dengan tuntunan-Nya, dan Allah memberikan rizki dari berbagai arah.

Firman Allah:



 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ رِزْقًا لَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
 عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak Adam dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rizki mereka dari hal yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan” (Q S. Al Isra’ [17]: 70).⁶⁶

Anak cucu Adam (manusia) tidak mungkin terepelihara kemuliaannya kecuali jika dia mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, melekatnya pakaian di badannya, memiliki tempat tinggal. Aturan Islam telah terbukti keunggulannya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang berada dalam keadaan membutuhkan. Rasul memerintahkan kalangan Anshar agar memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabat Muhajirin yang fakir, tatkala mereka menjalani kehidupan bersama. Jadilah mereka bersaudara karena Allah, sehingga mereka berhak mendapat anugerah Allah dan keridhaan-Nya.

⁶⁶ Depag R.I., *Op. Cit.* hal. 435

Rasulullah juga menikahkan seorang laki-laki dan memberinya segenggam kurma sebagai maharnya. Dalam hal ini, *Bait Al-Māl* yang berkewajiban menanggung semua itu sekuat kemampuan yang ada, karena negara itu adalah penanggung jawab atas semua rakyatnya.⁶⁷

Contoh lain tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya adalah sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khathab. Beliau telah membangun suatu rumah yang diberi nama *Dār Ad-Daqīq* (rumah tepung). Di sana tersedia berbagai jenis tepung, kurma dan barang-barang kebutuhan lainnya. Itu semua diperuntukkan secara cuma-cuma bagi orang-orang yang membutuhkannya, terutama musafir yang membutuhkan pertolongan. *Dār Ad-Daqīq* itu dibangun di jalan antara Makkah dan Syam, dan juga di jalan antara Syam dan Hijaz.⁶⁸

Biaya pembuatan *Dār Ad-Daqīq*, yang fungsinya sebagai pelayanan umum terhadap siapa saja yang sangat membutuhkan, adalah dari *Bait Al-Māl*.

Sumber dana *Bait Al-Māl*

Adapun sumber pengambilan bantuan diambilkan dari *Bait Al-Māl*, sedangkan pos-pos pendapatan untuk mengisi *Bait Al-Māl* berasal dari *zakat, jizyah, kharaj, khumus, rikaz, fai*, dan juga dari harta kepemilikan umum.⁶⁹

⁶⁷ An Nabhani, *Op.Ci.* hal. 36

⁶⁸ Al Badri, *Op. Cit.* hal. 36

⁶⁹ An Nabhani., *Op. Cit.* hal. 253.

Dari sekian banyak pos-pos pendapatan, harta kepemilikan umum termasuk sumber pemasukan yang cukup besar, di samping harta yang diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan futuhat. Zakat sebenarnya merupakan urutan yang kesekian yang jumlahnya tidak terlampau besar jika dibandingkan dengan sumber-sumber di atas. Zakat hanya diberikan kepada delapan ashnaf saja, yang lain tidak.

Dengan menegakkan pilar-pilar sistem ekonomi Islam dan juga mengoptimalkan peran negara dalam mengatur dan memelihara urusan umat, maka pengentasan kemiskinan bukanlah sesuatu yang mustahil.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode gabungan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif, dengan menekankan pada metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku, serta situasi-situasi tertentu tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, proses-proses yang sedang berlangsung, demikian juga pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁷⁰ Hal senada juga diungkapkan oleh Vredenberg bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dikembangkan oleh ilmuwan sosial.⁷¹

Dilihat dari gejala yang diamati, penelitian ini juga dikategorikan dalam studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu gejala tertentu.⁷²

Peneliti sengaja menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan tujuan agar peneliti mendapatkan data selengkap-

⁷⁰ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 64.

⁷¹ J. Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1979, hal. 34.

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998, hal. 131

lengkap, baik data-data yang bersifat statistik maupun data-data yang berupa pandangan ataupun pemikiran yang ada pada orang yang diteliti.

Metode kualitatif lebih menekankan pada pendekatan fenomenologis, yaitu pendekatan yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu, atau lebih dikenal sebagai sikap *verstehen*.⁷³ Miller dan Huberman mengungkapkan kelebihan pendekatan kualitatif yaitu dapat memberikan deskripsi, eksplanasi yang lebih berakar dan komprehensif, serta dapat mengikuti, memahami, mencari latar belakang dari munculnya suatu isu.⁷⁴

Data-data yang didapat dari metode kualitatif tentunya belum mencakup hal-hal yang bersifat kuantitatif, seperti pendapatan rata-rata, tingkat pendidikan rata-rata, dan lama jam kerja. Oleh karena itu, data-data kualitatif tersebut perlu didukung dengan data-data yang bersifat kuantitatif, sehingga data-data yang diperoleh cukup kuat untuk kemudian dilakukan analisis. Burges menamakan metode gabungan ini dengan istilah “strategi penelitian ganda”, yaitu metode penelitian yang beragam dalam memecahkan suatu masalah penelitian.⁷⁵ Penggabungan metode ini juga dikenal dengan sebutan lain yaitu strategi *triangulasi*, yang dikembangkan oleh Denzin,⁷⁶ yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar

⁷³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, hal. 9.

⁷⁴ Miller, M.B., Huberman, A.M., *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Press, 1992.

⁷⁵ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hal. 20.

⁷⁶ *Ibid.*

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.⁷⁷ Bahkan bagi Denzin, triangulasi tidak hanya mencakup metode dan data, tetapi juga para peneliti dan teori-teorinya juga.⁷⁸

Metode kualitatif yang digunakan di sini mempunyai peranan yang lebih menonjol dibandingkan dengan metode kuantitatif, atau dengan kata lain metode kuantitatif menjadi penunjang bagi metode kualitatif. Pada posisi seperti ini, data-data kuantitatif cenderung mengisi tiga fungsi, yaitu *pertama*, memberikan data latar belakang yang terukur untuk memberikan kelengkapan pada studi-studi intensif sekala kecil. Data-data ini sering sekali diambil dari data statistik resmi, seperti data sensus, publikasi pemerintah, dan lain-lain. *Kedua*, dapat memberi landasan bagi sampling kasus-kasus dan kelompok-kelompok pembanding yang berbentuk studi intensif. *Ketiga*, dapat juga digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh survey kualitatif.⁷⁹

Dari data-data yang diperoleh dari metode kuantitatif kemudian dicari reratanya, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang kondisi ekonomi masyarakat Lembah Code.

B. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti membagi langkah-langkah penelitian menjadi tiga tahap, yaitu tahap pralapanan, pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.⁸⁰

⁷⁷ Moleong, *Op.Cit.*, hal. 178.

⁷⁸ Brannen, *Op. Cit.* hal. 20

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 42.

⁸⁰ Moleong, *Op.Cit.*, hal. 84

1). Tahap pralapangan

Yang dimaksud dengan tahap pralapangan adalah tahap persiapan yang harus dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian secara langsung. Tahap ini mencakup hal-hal yang diperlukan baik yang berkaitan langsung dengan masyarakat yang akan diteliti maupun yang berkaitan dengan prosedur yang harus dilakukan.

Pada tahap ini hal-hal yang dilakukan di antaranya adalah: mengurus perizinan jika perlu, menjajaki dan menilai keadaan sosial masyarakat lapangan secara garis besar, memilih dan memanfaatkan informan atau juga tenaga bantu.

2). Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini peneliti mengkonsentrasikan diri untuk mendapatkan data seoptimal mungkin, baik melalui pengambilan data-data kualitatif maupun data kuantitatif.

a. Pengambilan data dalam metode kualitatif

Dalam tradisi kualitatif, peneliti menggunakan dirinya sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data. Dalam mencapai wawasan imajinatif ke dalam dunia sosial responden, peneliti diharapkan fleksibel dan reflektif tetapi tetap menjaga jarak.⁸¹

⁸¹ Brannen, *Op. Cit.* hal. 11

Pengambilan sampel pada metode kualitatif berbeda dengan pengambilan sampel pada metode kuantitatif. Pada metode kuantitatif sampel dipilih sedemikian rupa sehingga merupakan representasi dari populasi, sehingga dapat dilakukan generalisasi. Pada metode kualitatif, menurut Lincoln dan Guba peneliti mulai dari asumsi bahwa konteks itu kritis sehingga masing-masing konteks itu ditangani dari konteksnya sendiri. Peneliti tidak bermaksud untuk melakukan generalisasi, tetapi untuk merinci kekhususan yang ada sekaligus menggali informasi yang kemudian akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul.⁸² Oleh karena itu, dalam metode kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sampling*), yaitu sampel yang dicirikan dengan tidak dapatnya sampel tersebut ditentukan dahulu sebelum turun ke lapangan, pemilihan dilakukan secara berurutan dengan teknik “bola salju” (*snow ball*), dan pengambilan sampel segera diakhiri apabila sudah terjadi pengulangan informasi yang diperlukan.⁸³

Pada waktu pengambilan data peneliti beberapa kali ikut berperan serta secara langsung dalam kegiatan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara baik tentang kegiatan yang dilakukan, latar belakang yang mendorong tindakan tersebut dan juga tentang persepsi mereka. Dalam penelitian ini peneliti mengikuti

⁸² Moleong, *Op. Cit.* hal. 165

⁸³ *Ibid.*, hal. 166.

beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat Lembah Code, seperti rapat kampung, pengajian, dan pembinaan muda-mudi.

Pada pendekatan ini analisis terhadap data yang didapatkan sebenarnya sudah dapat dilakukan secara langsung di lapangan, tetapi hal ini tentunya akan ditindaklanjuti secara intensif setelah tugas di lapangan selesai.

Pengambilan data dapat dilakukan dengan menggunakan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi.⁸⁴

(1). Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai cara pengambilan data yang dilakukan oleh seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, dengan mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan atau responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.⁸⁵

Orang-orang yang diwawancarai atau yang sering disebut dengan *informan* adalah siapa saja yang diperkirakan mengetahui tentang seluk-beluk permasalahan yang ada. Mula-mula mewawancarai orang pertama yang diperkirakan mengetahui masalah. Orang pertama ini biasa disebut dengan *informan pangkal*. Setelah itu, kita dapat bertanya kepada informan tadi tentang siapa-siapa kiranya orang yang dapat diwawancarai berikutnya untuk

⁸⁴ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998, hal. 62.

⁸⁵ Kuntjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1991, hal. 129.

mendapatkan informasi lebih lanjut. Orang-orang inilah yang akan menjadi informan pokok atau *key informan*, suatu istilah yang pertama kali dikembangkan oleh S.F. Nedel.⁸⁶

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (*unstructured interview*) dan bersifat terbuka (*overt*), yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak baku, baik kalimat maupun urutan pertanyaannya, bahkan tanya jawabnya mengalir seperti percakapan sehari-hari dan yang diwawancarai mengetahui bahwa dia sedang diwawancarai untuk sebuah penelitian.⁸⁷

Adapun orang-orang yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di Lembah Code, atau siapa saja yang dinilai mengetahui tentang seluk-beluk masyarakat Lembah Code. Orang-orang tersebut di antaranya: Riyanto (pengurus masjid), Bapak Agus (ketua RT 18), Ibu Murwoto (ketua Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera-UPPKS), Bapak Zarkasi (tetua masyarakat), Bapak Mujito (tokoh masyarakat), Bapak Siswo Sukarjo (tokoh masyarakat dan juga ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat-PKBM), Bapak Totok Sukarjita (tokoh masyarakat), Bapak Sugiyanto (Lurah Terban).

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 130, 137.

⁸⁷ Moleong, *Op. Cit.* hal. 138.

(2). Observasi

Pada observasi, peneliti tidak melakukan pertanyaan kepada subjek, namun mengamati terhadap apa yang ada, baik itu berupa kebiasaan masyarakat, bentuk-bentuk bangunan rumah dan kondisinya, dan lain-lain. Observasi ini dilakukan di samping dengan pengamatan, juga dilakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.⁸⁸ Dalam observasi kualitatif, sesuai dengan tujuan metode kualitatif, yaitu untuk merinci kekhususan yang ada, maka jenis observasi yang dilakukan sedapat mungkin dengan *observasi partisipatoris*, yaitu pengamat menjadi bagian dari situasi yang diamati.⁸⁹



(3). Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang ada dimanfaatkan sebagai data-data pendukung. Sebagian besar dokumen-dokumen yang didapat merupakan data sekunder yang berupa data sensus kota Yogyakarta, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kecamatan-kecamatan se-Yogyakarta, Survey Biaya Hidup (SBH) dan juga hasil pendataan keluarga miskin DIY lainnya.

⁸⁸ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian unruk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1993, hal. 89

⁸⁹ Sumanto, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hal. 90. Lihat juga Brannen, *Op. Cit.* hal. 11.

Dari data-data pendukung tersebut nantinya digambarkan kondisi pada umumnya di lingkungan Yogyakarta dan data ini dapat juga digunakan sebagai pembanding.

b. Pengambilan data dalam metode kuantitatif

Pada pendekatan kuantitatif, penulis melakukan pengambilan data dengan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data-data yang diperoleh berfungsi sebagai pendukung terhadap data-data yang diperoleh pada metode kualitatif.

Menurut Suharsimi Arikunto, besarnya sampel pada random sampling, jika populasinya kurang dari 100, maka sebaiknya diambil semua. Namun, jika populasinya besar, maka pengambilan sampel boleh diambil 10 % - 15 % atau 20 % - 25 %, atau jika memungkinkan lebih besar lagi.⁹⁰

Karena jumlah populasi pada penelitian ini berjumlah 600, maka peneliti mengambil sampel 20 % dari populasi, yaitu sebesar 120 sampel.

Sebagai unit analisis, yaitu satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian,⁹¹ adalah Kepala Keluarga (KK), yang juga sekaligus berfungsi sebagai sumber data. Adapun objek penelitian atau

⁹⁰ Arikunto, *Op. Cit.* hal. 120

⁹¹ Arikunto, *Op. Cit.*, hal. 132.

variabelnya adalah jenjang pendidikan, pekerjaan, pendapatan keluarga, lama jam kerja setiap hari, upaya mencari pekerjaan lain yang lebih baik, dan juga pelaksanaan ibadah keagamaan, dalam hal ini adalah salat.

Cara penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan Tabel Angka Random yang terdapat dalam bukunya Moh. Nasir, Ph.D.⁹² Caranya adalah:

1. Mencatat seluruh nama-nama KK yang ada di daerah populasi, yaitu sebanyak 600 KK. Setiap KK diberi nomor urut dari 001 s.d. 600.
2. Meletakkan ujung pensil, dengan mata tertutup, di atas Tabel Angka Random. Dari sana angka yang tertunjuk dijadikan patokan selanjutnya.
3. Dari angka yang tertunjuk kemudian bergerak ke kanan sebanyak dua langkah, untuk mendapatkan tiga digit angka.
4. Pilihan pengambilan angka berikutnya adalah bergerak ke bawah, lurus dengan tiga digit angka pada pilihan awal.
5. Angka-angka yang terpilih adalah angka sampel yang akan diambil. Apabila terdapat angka yang melebihi angka 600, maka pemilihan angka dilanjutkan ke bawahnya sampai didapat sampel berjumlah 120 sampel.
6. Angka-angka tersebut kemudian dicocokkan dengan daftar KK yang sudah diberi nomor urut tadi. Dua ratus nama-nama yang terpilih tadi adalah sampel yang kemudian diberi angket.⁹³

⁹² Nasir, *Op. Cit.*, hal. 596

⁹³ Dirujuk dari *Ibid.*, hal. 336.

3) Tahap analisis data

Patton mendefinisikan analisis sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kerja, kategori, dan satuan uraian dasar.⁹⁴ Taylor memberikan definisi sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.⁹⁵ Dapat dipahami bahwa analisis data adalah upaya pengorganisasian data sehingga ditemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini didasari atas metode ***Induksi-Analitik-Mabda'i***. Metode ini merupakan pemikiran dari peneliti sendiri, yang menggabungkan antara metode *induksi analitik* dan pemikiran *mabda'i*.

Induksi analitik adalah milik Znaniecki dan Lindesmith, yaitu suatu proses analisis ketika peneliti bergerak dari data melalui perumusan hipotesis kepada pengujian dan juga verifikasi.⁹⁶ Prosesnya dimulai saat peneliti terjun di lapangan, kemudian peneliti memulai masalah secara kasar, kasus yang konkret diamati dan ciri-cirinya diabstraksikan, kemudian dicocokkan sehingga dapat diketahui bahwa fakta-fakta yang ada tersebut mendukung hipotesis atau tidak.

⁹⁴ Moleong, *Op.Cit.*, hal. 103.

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ Brannen, *Op. Cit.* hal13.

Kata *mabda'* digunakan oleh Muhammad Muhammad Ismail, yaitu suatu pemikiran yang senantiasa berkait dengan cara pandang seseorang tentang alam, manusia, dan kehidupan.⁹⁷ Dengan demikian, *mabda'* berarti pemikiran yang mendasar, yang dengan pemikiran tersebut dibangun pemikiran-pemikiran yang lain. Taqiyuddin An Nabhani mendefinisikan *mabda'* sebagai *fikrah* dan *ṭarīqah*, yaitu pemikiran yang menyeluruh dan mendasar tentang kehidupan yang darinya dibangun pemikiran-pemikiran cabang.⁹⁸ Atau, dengan kata lain *mabda'* adalah sebuah ideologi.

Kaitannya dalam penelitian kemiskinan ini, Jalaludin Rakhmat mengungkapkan bahwa kemiskinan boleh jadi sudah disepakati menjadi masalah sosial, namun apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya sangatlah bergantung pada ideologi apa yang digunakan.⁹⁹ Untuk itulah dalam menganalisis data-data yang ada, peneliti akan senantiasa mengaitkan dengan pengetahuan yang peneliti dapatkan dari literatur, termasuk nilai-nilai politik yang ada pada peneliti.¹⁰⁰ Pemikiran yang mendasari peneliti adalah pemikiran-pemikiran dalam perspektif Islam.

Analisis ini berangkat dari berbagai kasus yang bersifat khusus yang kemudian disimpulkan menjadi ungkapan yang umum atau universal. Dengan ungkapan yang sederhana, metode yang digunakan peneliti dalam analisis data adalah metode *induksi-analitik-mabda'i*, yaitu metode

⁹⁷ Muhammad Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, Jakarta: 1995, hal. 180.

⁹⁸ Taqiyuddin An Nabhani, *Nidzam al Islam*, Jakarta: Pustaka Thariqul 'Izzah, 1993, hal.

⁹⁹ Jalaludin Rakhmat, "Sufisme dan Kemiskinan", dalam Sri Edi Swasono, *Op. Cit.*, hal. 24.

¹⁰⁰ Brannen, *Op. Cit.* hal. 16.

analisis yang bertumpu pada data-data ataupun pemikiran-pemikiran dari subjek yang diteliti, untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Dalam melakukan proses analisis ini peneliti selalu mengaitkan dengan *mabda'* Islam.

Adapun urutan-urutan analisis adalah:

1. Mengambil data-data yang ada selengkap mungkin, sehingga akan diperoleh pengetahuan tentang permasalahan secara baik (*mafhūm 'alā'al-musykilah*).
2. Memahami nas-nas, syara' yang berkaitan dengan persoalan yang ada (*mafhūm 'alā'an nusūs*).
3. Mengaitkan permasalahan-permasalahan yang ada dengan nas-nas, syara', sehingga kemudian berusaha untuk mengetahui bagaimana penerapannya (*taṭbīq al-ahkām asy-syar'*).

Adapun langkah –langkah secara praktis dalam melakukan analisis tersebut adalah :

1. Menyusun satuan (*unityzing*)

Yaitu langkah menyusun suatu kondisi sosial, dalam hal ini didasarkan atas asumsi-asumsi bahwa perilaku sosial dan budaya hendaknya dipelajari dari segi pandangan dari dalam dan definisi perilaku masyarakat itu sendiri, atau lebih dikenal dengan perspektif *emik*.¹⁰¹

¹⁰¹ Moleong, *Op. Cit.* hal. 190

2. Kategorisasi

Yaitu proses mengelompokkan data-data yang disusun atas kesamaan pemikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Dari kategori-kategori tersebut nantinya akan dicari urutan dan keterkaitan antara satu dengan lainnya.

3. Penafsiran data

Dari kategori-kategori data yang ada kemudian dicari tentang tipe yang ada, strukturnya, apa penyebabnya, apa konsekuensinya berdasarkan tuntutan data. Di sini peneliti melakukan penafsiran sesuai dengan tuntutan data.¹⁰²



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁰² *Ibid.*

BAB IV
ANALISIS DATA

A. Data

1). Data-data Sekunder

a). Pendapatan Keluarga

Kondisi sosial, khususnya ekonomi masyarakat Daerah Lembah Code sudah barang tentu tidak dapat dipisahkan dengan kondisi yang ada pada masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Kondisi ekonomi masyarakat kota Yogyakarta dapat diukur dari berapa besar Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atau juga dilihat PDRB per Kapita Yogyakarta. Data-data berikut menunjukkan PRDB Yogyakarta.

TABEL 1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KOTA
YOGYAKARTA ATAS DASAR HARGA BERLAKU *

	Tahun			
	1998	1999	2000	2001
PDRB (Juta Rupiah)	2.502.561	2.868.850	3.189.020	3.596.288
PDRB per Kapita (Rp)	5.734.111	6.467.433	7.076.003	9.065.269
PDRB per Keluarga per Bulan (Rp)	2.408.326	2.716.321	2.971.933	3.777.195

* Sumber: - Diolah dari Kota Yogyakarta Dalam Angka 2001

Dengan PDRB per Kapita Yogyakarta pada ahun 2001 sebesar Rp 9.065.259,00 per tahun atau Rp 755.438,00 per bulan dan rata-rata jumlah anggota keluarga 5 orang per keluarga, maka pendapatan rata-

rata keluarga Yogyakarta adalah $5 \times \text{Rp } 755.438,00 = \text{Rp } 3.777.195,00/\text{bulan}$. Hal ini jauh dari angka garis batas kemiskinan.

Demikian juga di tingkat kecamatan, angka-angka PDRB kecamatan cukup tinggi dan jauh dari garis batas kemiskinan. Sebagai gambaran posisi PDRB per Kapita kecamatan Gondokusuman dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Yogyakarta, dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2
PDRB PER KAPITA MASING-MASING KECAMATAN
SE-YOGYAKARTA*

No.	Kecamatan	PDRB (Juta Rp)	Jumlah Pddk	PDRB per Kapita (Rupiah)	PDRB per Keluarga per Bulan
1	Gondomanan	190.128	20.332	9.351.204	3.896.335
2	Jetis	304.091	37.251	8.163.310	3.401.379
3	Danurejan	244.129	29.982	8.142.542	3.392.725
4	Kotagede	208.224	26.732	7.789.353	3.245.563
5	Umbulharjo	460.120	62.282	7.387.696	3.078.206
6	Gedongtengen	161.839	26.019	6.220.065	2.591.693
7	Mergangsan	222.076	40.263	5.515.637	2.298.182
8	Pakualaman	73.351	14.438	5.080.431	2.116.846
9	Wirobrajan	146.652	29.291	5.006.065	2.085.860
10	Gondokusuman	336.765	71.043	4.740.303	1.975.126
11	Mantrijeron	178.997	38.166	4.689.983	1.954.159
12	Ngampilan	100.760	22.774	4.424.358	1.843.482
13	Tegalrejo	149.612	37.397	4.000.654	1.666.939
14	Kraton	92.096	31.145	2.957.037	1.232.098

*Sumber: Diolah dari BPS Kota Yogyakarta tahun 1999

Kecamatan Gondokusuman, yang di dalamnya terdapat daerah Lembah Code, termasuk urutan ke-10 dari 14 kecamatan yang ada, yaitu dengan PDRB per Kapita sebesar Rp 4.740.303,00. Ini berarti pendapatan rata-rata keluarga sebesar **Rp 1.975.126,00 per bulan**.

Dilihat dari angka rata-rata tersebut, seakan-akan Yogyakarta merupakan daerah yang relatif sudah makmur, atau paling tidak berada di atas garis kemiskinan. Namun, jika dilihat dari data tentang penghasilan rata-rata keluarga Yogyakarta, maka akan terlihat bahwa pendapatan rata-rata per Kapita tidak sepenuhnya mengindikasikan bahwa masyarakat di daerah tersebut berada di atas garis kemiskinan. Tabel berikut menampilkan pendapatan rata-rata keluarga Yogyakarta.

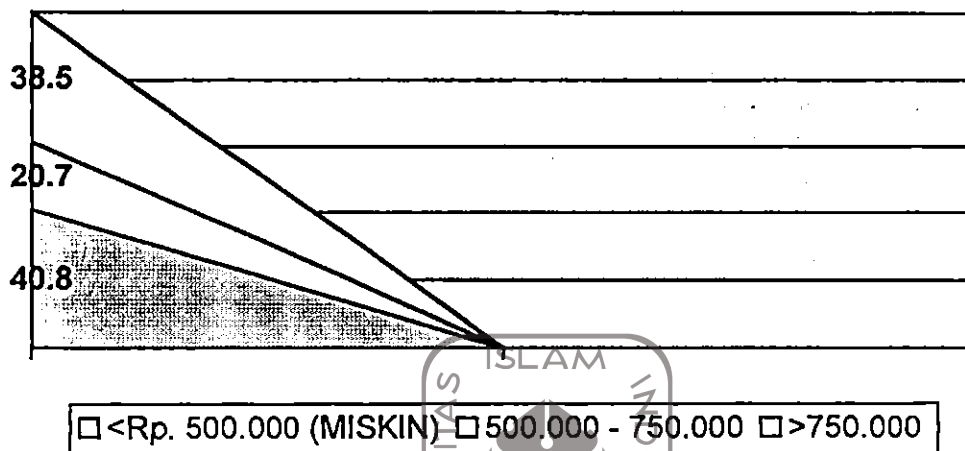
TABEL 3

RATA-RATA PEMASUKAN RUMAH TANGGA KOTA YOGYAKARTA
SELAMA SEBULAN*

Kelompok Pemasukan (Rupiah)	Banyaknya Rumah Tangga Ekonomi			Pemasukan Rata-rata
	Jumlah KK	%	% kum.	
<100.000	207	0.33	0.33	91.115
100.000 – 199.999	10.499	4.51	4.84	186.641
200.000 – 299.999	7.703	12.43	17.27	251.125
300.000 – 399.999	8.378	13.52	30.79	347.526
400.000 – 499.999	6.191	9.99	40.78	445.872
500.000 – 749.999	12.851	20.73	61.51	628.321
750.000 – 999.999	7.359	11.87	73.38	855.157
1000.000 – 1.999.999	8.153	18.94	92.32	1.829.572
2000.000 – 2.999.999	2.766	4.46	96.8	2.439.608
> 3.000.000	1.985	3.20	100	5.928.155

* Sumber: Diolah dari Survey Biaya Hidup 1999, BPS Indonesia

GAMBAR 1
DISTRIBUSI PENDAPATAN KELUARGA KOTA YOGYAKARTA*



* Diolah dari Survey Biaya Hidup 1999 Kota Yogyakarta

Dari tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa pendapatan keluarga yang besarnya di bawah Rp 500.000,00 per bulan adalah sebanyak 40,78 %. Karena batasan pendapatan keluarga miskin adalah Rp 540.000,00 per bulan, maka pendapatan keluarga berdasar hasil Survey Biaya Hidup (SBH) yang kurang dari Rp 500.000,00 per bulan dimasukkan dalam kelompok keluarga miskin. Hal itu berarti 40,78% keluarga di Kota Yogyakarta berada di bawah garis kemiskinan.

Jika kita naik sedikit dengan pendapatan Rp 500.000,00 – Rp 7499.999,00 yaitu dengan rata-rata Rp 628.321,00 per bulan, di sana ada sejumlah 20,73 % yang sebenarnya belum dapat disebut sebagai keluarga mampu. Kelompok ini sering disebut sebagai *near poor*. Lukman Sutrisno mengungkapkan bahwa *near poor* hidupnya memang relatif lebih baik dibandingkan kemiskinan yang *destitute* (melarat), namun belum benar-

benar stabil dalam arti jika sewaktu-waktu kelompok ini menghadapi krisis, maka dia dengan cepat akan melorot lagi ke status *poor* atau bahkan ke *destitute poor*.¹⁰³

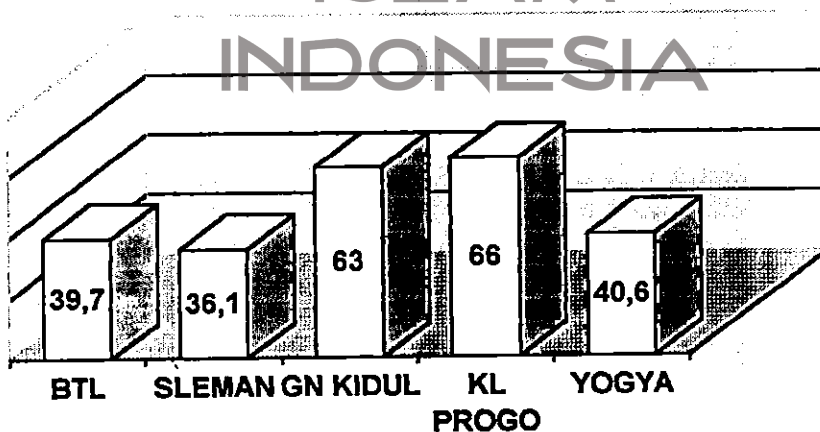
Data kemiskinan tersebut diperkuat dengan data dari BKKBN Yogyakarta di bawah ini.

TABEL 4
JUMLAH KELUARGA MISKIN DIY PER KABUPATEN/KOTA*

No	Kabupaten /Kota	Jumlah KK	Jumlah Keluarga Miskin	Jumlah Jiwa	%	A Prasejahtera		B Sejahtera I		A+B %
						KK	%	KK	%	
1	Bantul	206.078	41.230	144.609	20	32.652	15.8	49.170	23.9	39.7
2	Sleman	215.857	46.619	165.610	22	21.982	10.2	56.020	26	36.1
3	Gunung Kidul	200.898	82.614	299.304	41	69.788	34.7	56.668	28	63
4	Kulon Progo	108.403	49.097	204.967	45	45.352	41.8	26.229	24	66
5	Kota Yogya	83.544	15.861	61.504	19	4.246	5.1	29.656	36	40.6
	DIY	814.780	235.421	875.894	29	174.020	21.4	217.743	26.7	48.1

* Sumber: BKKBN Yogyakarta 2001

GAMBAR 2
PERSENTASE KELUARGA PRASEJAHTERA DAN SEJAHTERA I
MASING-MASING KABUPATEN/KOTA DI DIY*



* Diolah dari BKKBN Yogyakarta 2001

¹⁰³ Loekman Sutrisno, dalam Dewanta (ed.), *Kemiskinan & Kesenjangan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995, hal. 23

Dari tabel/grafik di atas dapat dilihat bahwa keluarga PraSejahtera dan Sejahtera I berjumlah 33.902 atau 40,58 % dari total keluarga Yogyakarta

b). Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk kota Yogyakarta berdasarkan sensus tahun 2000 adalah sebesar 396.711 jiwa. Jika dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain di DIY, maka kota Yogyakarta menempati urutan keempat, yaitu setelah Sleman, Bantul dan Gunung Kidul. Namun, kepadatan penduduknya Yogyakarta menempati urutan pertama, yaitu 12.206 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk paling rendah adalah Gunung Kidul, yaitu dengan kepadatan penduduk 451 jiwa/km². Data jumlah penduduk jika dikaitkan dengan jumlah kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 5
KEPADATAN PENDUDUK DAN JUMLAH KEMISKINAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah penduduk	Kepadatan (Jiwa/km ²)	Miskin (PS + S I)** (%)
Bantul	506,85	781.013	1.541	39.7
Sleman	574,82	901.377	1.568	36.1
Gunung Kidul	1485,36	670.433	451	63
Kulon Progo	586,27	370.944	633	66
Kota Yogyakarta	32,50	396.711	12.206	40.6
DIY	3.185,8	3.120.478	980	48.1

* Diolah dari BPS DIY 2000 dan BKKBN Yogyakarta

** PS: Prasejahtera; SI : Sejahtera I

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk yang tertinggi adalah Kota Yogyakarta, yaitu 12.206 orang per km², mempunyai jumlah kemiskinan sebesar 40,6 %. Adapun daerah yang paling jarang penduduknya adalah Gunung Kidul yaitu 451 orang per km², mempunyai jumlah kemiskinan paling besar yaitu 63 %.

2). Data-data Primer

a. Data Hasil Angket

(1). Jumlah Keluarga Miskin di Lembah Code

Dari 120 angket yang diberikan kepada responden, didapat data sebagai berikut:

TABEL 6
PENDAPATAN KELUARGA RATA-RATA PER BULAN
DI LEMBAH CODE

Pendapatan per Bulan (Rupiah)	Jumlah responden	Persentase	Persen kumulatif
< 200.000	32	26,7	26,7
200.000 – 303.749	30	25	51,7
303.750 – 399.999	26	21,7	73,4
400.000 - 539.999	18	15	88,4
≥ 540.000	14	11,6	100
Jumlah	120	100	

Dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan Prof. Sayogya didapat sebanyak 106 responden atau 88,4 % dari total responden memiliki pendapatan per bulan kurang dari Rp 540.000,00. Ini berarti 88,4 % responden adalah miskin. Bahkan ada 51,7 % yang tergolong

dalam kelompok Paling Miskin, yaitu dengan penghasilan keluarga di bawah Rp 303.750,00 per bulan.

Hal tersebut dapat dipahami jika melihat jenis pekerjaan yang mereka tekuni. Tabel berikut menampilkan jenis-jenis pekerjaan yang ada.

TABEL 7
JENIS PEKERJAAN RESPONDEN

Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
Tidak tentu (<i>srabutan</i>)	4	3,3
Buruh	68	56,7
Wiraswasta	8	6,6
Pegawai kantor swasta	32	26,8
Pegawai negeri	8	6,6
Jumlah	120	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pekerjaan sebagian besar responden adalah buruh (56,7 %), dan sangat sedikit yang melakukan wiraswasta (6,6 %). Hal ini dapat dipahami jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan responden.

TABEL 8
TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN

Tingkat pendidikan	Jumlah Responden	Persentase	Persen kumulatif
Tidak sekolah	12	10	10
SD	36	30	40
SLTP	40	33,3	73,3
SMU	24	20	93,3
PT	8	6,7	100
Jumlah	120	100	

Tingkat pendidikan responden 40 % hanya mengenyam pendidikan maksimal setingkat SD. Bahkan 10 % di antaranya tidak sekolah.

(2). Sikap Masyarakat terhadap Kondisi Kemiskinan yang Dihadapi

Peneliti berusaha mendapatkan informasi tentang sejauh mana kesungguhan mereka untuk berlepas diri dari jerat kemiskinan. Biasanya kesungguhan itu diukur dari etos kerjanya, paling tidak dapat ditandai dengan lamanya jam kerja setiap hari, dan usaha untuk mencari jenis pekerjaan yang lebih baik.

(a). Lama Jam Kerja

Hasil angket tentang lamanya jam kerja responden dapat dilihat pada tabel berikut:



TABEL 9

LAMA JAM KERJA DALAM SATU HARI

Lamanya jam kerja selama satu hari	Juml.	%
> 7 jam (bekerja dari pagi sampai sore, kemudian bekerja lagi)	32	26,7
7 jam (bekerja dari pagi sampai sore)	64	53,3
4 jam (bekerja setengah hari)	12	10
Tidak tentu	8	6,7
Total	120	100

Dari data yang diperoleh, ada sebanyak 26,7 % atau sebanyak 32 responden yang bekerja lebih dari 7 jam per hari. Yang bekerja

sampai 7 jam sebanyak 53,3 % (64 responden). Hal ini berarti sebanyak 80 % responden bekerja minimal 7 jam sehari.

(b). Upaya Mencari Pekerjaan yang Lebih Baik

Data yang diperoleh tentang upaya mereka mencari pekerjaan yang lebih baik dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 10
UPAYA MENCARI PEKERJAAN YANG LEBIH BAIK

Upaya mencari pekerjaan yang lebih baik	Juml.	%
Ya, dan pekerjaan itu sampai sekarang masih ditekuni	33	27,5
Ya, sering, tetapi belum berhasil	37	30,8
Belum, tetapi ingin	42	35
Belum, dan tidak tertarik	8	6,7
Total	120	100

Dapat diketahui bahwa upaya mencari pekerjaan yang lebih baik telah dilakukan. Yang telah mencari pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang lama dan sampai sekarang masih ditekuni adalah 27,5 %. Adapun yang berulang kali berusaha namun gagal sebanyak 30,8. Responden yang belum melakukan upaya mencari pekerjaan yang lebih baik adalah 41,7 %. Hal ini berarti sebanyak 58,3 % berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik.

(c). Aktivitas Ibadah Keagamaan

Walaupun mereka menghadapi kesulitan dalam ekonomi, namun mereka masih melakukan aktivitas ibadah keagamaan, walaupun jumlahnya tidak banyak, khususnya yang rutin dan teratur.

TABEL 11
AKTIVITAS IBADAH KEAGAMAAN

Aktivitas Ibadah	Juml. Responden	%
Rutin dan teratur setiap hari	29	24,1
Mengerjakan, tetapi tidak teratur setiap hari	13	10,9
Sangat jarang	12	10
Tidak melakukan	66	55
Total	120	100

Dari data di atas dapat diketahui bahwa yang melakukan ibadah rutin dan teratur hanya 24,1 %, sedangkan yang lainnya tidak teratur, dan bahkan sebagian besar tidak melakukan ibadah.

b. Data-data Hasil Wawancara

Di samping data-data yang didapatkan dari angket, juga diperoleh data-data sikap melalui wawancara. Dari beberapa wawancara dapat dijelaskan bahwa masyarakat sebenarnya mempunyai semangat untuk berubah, namun karena desakan kebutuhan, dan juga karena ketidakmampuan dalam manajemen, maka menjadikan mereka sulit untuk keluar dari kemiskinan.¹⁰⁴ Hal ini dituturkan juga oleh Bp. Sugiyanto, Lurah Terban. Masyarakat juga pernah beberapa kali mendapat kesempatan meminjam dana untuk membuka usaha, namun karena kurang baiknya manajemen, maka dana tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan bahkan ada

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Zarkasi, tgl. 15 Juli 2002. Beliau adalah anggota masyarakat yang setiap bulan menerima sumbangan beras *Raskin* sebesar 5 kg.

yang justru digunakan untuk biaya hidup sehari-hari.¹⁰⁵ Hal tersebut juga diakui oleh Bapak Mujito, ketua RW 04 Terban, bahwa bantuan kredit usaha banyak yang macet, khususnya di RW 04, sehingga warga RW 04 yang ingin mengajukan permohonan bantuan selalu ditolak dengan alasan bahwa kredit yang diberikan kepada warga RW 04 masih banyak yang macet, walaupun yang meminjam adalah orang yang berlainan.¹⁰⁶

Alasan lain yang menyebabkan usaha mereka gagal adalah jalannya usaha yang tidak lancar. Mereka pernah dibantu untuk mendirikan kelompok usaha bengkel motor. Pada awal-awal usaha, kerja sama yang dilakukan masih baik, namun pada masa-masa berikutnya terjadi kerja sama yang kurang harmonis. Persoalannya karena persaingan usaha yang sangat berat, terlebih lagi ini dilakukan oleh orang-orang yang baru belajar dan manajemennya sangat tradisional dan apa adanya, sehingga pembagian kerja yang ada tidak semuanya mendatangkan uang. Oleh karena itu, kemudian terjadi pemborosan di bagian unit tertentu, yang mengharuskan bagian tersebut disubsidi oleh bagian yang lain. Hal ini terjadi terus-menerus sehingga tidak lama kemudian usaha tersebut ambruk, dan kreditnya pun macet.¹⁰⁷

Mereka berharap sekali adanya upaya untuk membantu mereka berlepas dari kemiskinan. Mereka juga sadar bahwa kemiskinan di daerah Lembah Code sering menjadi sorotan

¹⁰⁵Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Lurah Terban, tgl. 20 Agustus 2002.

¹⁰⁶Wawancara dengan Bapak Mujito, ketua RW 04 Terban, tgl. 25 Agustus 2002.

¹⁰⁷*Ibid.*

masyarakat luas. Namun keterbatasan-keterbatasan yang ada sering menjadi kendala, baik itu kebutuhan ekonomi yang mendesak untuk dipenuhi maupun masalah keahlian yang sangat terbatas. Oleh karena itu mereka sangat antusias jika ada pihak luar yang mengadakan pelatihan-pelatihan. Namun demikian, masyarakat lebih senang dipinjami dana, daripada diberi pelatihan usaha. Hal ini karena dana segar akan lebih mudah digunakan untuk apa saja, termasuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang sering menyebabkan macetnya kredit yang disalurkan. Oleh karena itu, upaya untuk membantu pengentasan kemiskinan mulai banyak diwujudkan dalam bentuk barang yang digunakan untuk usaha, seperti penggorengan untuk usaha kripik, alat sablon, dan alat pertukangan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengurangi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan semula, yaitu usaha.¹⁰⁸

Di satu sisi masyarakat semangat untuk keluar dari jerat kemiskinan, namun di sisi lain semangat itu tidak menerus. Artinya, masyarakat bersemangat ketika awal-awal mendapat bantuan dari luar, baik itu berupa dana usaha maupun pelatihan, namun tidak lama kemudian semangat itu kendur dan kemudian hilang. Mereka sering kurang mempunyai *greget* atau semangat yang tinggi, atau kadang-kadang tidak kreatif dan kurang mempunyai inovasi.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Agus, ketua RT 18 Terban, tgl. 18 Agustus 2002.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Lurah Terban, 20 Agustus 2002.

Hasil dari pembinaan dalam bidang keahlian, menurut keterangan Bapak Lurah Terban, dari rata-rata 20 orang yang mengikuti pelatihan usaha, kurang lebih hanya 2 orang yang mampu bertahan dan melanjutkan usaha yang ditekuninya.¹¹⁰ Ini berarti yang berhasil hanya 10 %.

Usaha-usaha bantuan untuk menyelesaikan permasalahan kesulitan ekonomi di daerah Lembah Code sudah beberapa kali dilakukan. Sebagai contoh yaitu pada sekitar pertengahan tahun 1998 pernah diadakan pelatihan pertukangan, budidaya jangkrik, dan budidaya cacing tanah. Seperti yang diungkapkan oleh ketua pelaksanaanya, yaitu Bapak Totok Sukarjita, usaha tersebut telah menemui kegagalan. Hal itu disebabkan oleh rendahnya jiwa *entrepreneurship* di kalangan masyarakat, dan juga kondisi pasar yang tidak memungkinkan untuk menumbuhkan usaha kecil yang baru mulai tersebut. Sebagai contoh untuk usaha cacing tanah, diinformasikan bahwa harga jual cacing tanah bisa mencapai Rp 30.000,00/kg. Namun, pada kenyataannya, ketika panen harga cacing tanah hanya Rp 3000,00/kg. Demikian juga halnya dengan jangkrik. Hal ini membuat mereka putus asa.¹¹¹

Kegagalan juga terjadi pada usaha pertukangan kayu. Masyarakat merasa hasilnya kurang dapat memberikan harapan,

¹¹⁰Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Lurah Terban, tgl. 30 Agustus 2002

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Totok Sukarjita, 25 Agustus 2002. Beliau juga sebagai Sekretaris RT 17 RW 04 Lebbah Code.

karena penjualannya yang lama, dan juga bahan-bahannya yang relatif mahal. Di samping itu, mereka boleh dibilang relatif baru dalam mengenal usaha pertukangan kayu, dan ini menjadikan mereka kurang gigih.

Dengan berbagai masalah yang ada tersebut, usaha-usaha tersebut gagal. Petak-petak kolam yang semula untuk budidaya cacing, kini terbengkelai. Alat-alat tukang yang dahulu untuk usaha bersama, kini tidak tahu di mana rimbanya.¹¹²

Namun demikian, dari sekian banyak yang gagal ada seorang warga yang boleh dibilang berhasil. Beliau adalah Bapak Totok Sukarjita sendiri, yang kini menekuni *handicraft* yang terbuat dari kayu. Omset yang pada awal-awal usaha jumlahnya tidak tentu, kini omsetnya mencapai puluhan juta rupiah per bulan, bahkan beliau *kewalahan* (kesulitan) dalam melayani *demand* (permintaan), khususnya perminataan yang tanpa uang muka. Hal ini, kata beliau, karena keterbatasan dana yang ada. Karena kegigihannya, kini pemasaran *craft*-nya sudah mencapai Jepang.¹¹³

Kegagalan usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat juga diakui oleh Ibu Murwoto, selaku ketua harian Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang merupakan binaan BKKBN. Dia menuturkan bahwa beberapa anggota yang awalnya

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

meminjam dana untuk usaha, namun karena lemahnya manajemen dan adanya himpitan ekonomi menyebabkan dana yang tadinya dialokasikan untuk usaha justru digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dengan demikian, kredit itu pun menjadi macet atau paling tidak pengembaliannya sangat lama. Ibu Murwoto merasakan bahwa kehidupan ekonomi semakin hari bukan semakin mudah, namun justru semakin sulit, khususnya semenjak krisis ekonomi tahun 1998. Namun, karena pertimbangan demi jalannya usaha, dia terpaksa mengeluarkan beberapa anggotanya karena dinilai tidak mampu memenuhi kewajiban.¹¹⁴

Dengan kondisi yang mereka hadapi, sebenarnya bukan berarti mereka merasa cukup dengan kondisi tersebut, namun mereka juga bingung mau berbuat apa lagi untuk menyelesaikan kesulitan yang ada. Dengan demikian, mereka harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang serba terbatas dan terpaksa tersebut.¹¹⁵

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Murwoto, 30 Juli 2002. Beliau adalah pejabat ketua sementara UPPKS RW 04 Lembah Code. Selaku ketuanya sebenarnya adalah Ibu Supriyanto, namun karena beliau tidak aktif, maka jabatan ketua dijalankan oleh Ibu Murwoto (Ibu Atun). UPPKS ini didirikan tahun 1991 dengan pinjaman dana tanpa bunga dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Yogyakarta sebesar Rp. 500.000 untuk digulirkan kepada anggota sebagai modal usaha. Kini UUPKS Lembah Code dalam melakukan usahanya bekerja sama dengan BPR Bakti Daya Ekonomi Pakem. Dan kini perputaran uang sampai dengan April 2002 sudah mencapai 16 juta rupiah, dengan anggota sebanyak 25 orang.

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Zarkasi, tgl. 15 Juli 2002.

B. Analisis

(1). Kelemahan Pengukuran Kesejahteraan dengan Pendapatan Rata-rata.

Berdasarkan data-data yang didapatkan, pendapatan per kapita Yogyakarta tahun 2001 adalah relatif tinggi, yaitu Rp 9.065.259,00 atau pendapatan rata-rata keluarga sebesar Rp 3.777.191,00/bulan. Demikian juga PDRB per Kapita kecamatan Gondokusuman, yaitu Rp 4.740.303,00 atau Rp1.975.126,00 per keluarga per bulan. Hal tersebut berarti pendapatan rata-rata keluarga Yogyakarta masih jauh di atas garis kemiskinan.

Namun demikian, perhitungan kesejahteraan yang hanya menekankan pada angka rata-rata sebenarnya tidak memperhitungkan berapa yang berpendapatan tinggi, dan berapa yang berpendapatan rendah, sehingga ukuran kesejahteraan ini cenderung tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini terbukti dari data pendapatan rata-rata keluarga menurut hasil Survey Biaya Hidup yang menunjukkan bahwa ternyata di Yogyakarta keluarga yang berpenghasilan di bawah Rp 500.000,00 per bulan sebanyak 40,78 %. Ini berarti penduduk miskin di Yogyakarta adalah sebesar 40,78 %. Angka kemiskinan tersebut tidak dapat terbaca jika hanya diukur dengan menggunakan PDRB ataupun PDRB per Kapita.

Oleh karena itulah, Mabhuh UI Haq mengkritik bahwa angka-angka pertumbuhan rata-rata atau juga pendapatan rata-rata memang sering menipu. UI Haq mengatakan bahwa : “Kita terlalu konsentrasi dengan peningkatan laju Gross National Product (GNP) atau juga pendapatan rata-

rata dengan asumsi bahwa hal itu adalah syarat penanggulangan kemiskinan. Kita selalu berbicara ‘Berapa yang diproduksi, tetapi lupa tentang bagaimana pembagiannya.’¹⁰³ Lebih jauh Mahbub Ul Haq mengatakan : “Mari kita melenyapkan kemiskinan lebih dahulu. Biarkan saja ukuran pertumbuhan itu sendiri, karena bagaimanapun hal itu hanya sebuah ukuran yang kebetulan enak dipakai untuk mencerminkan hasil usaha manusia, namun bukan penggerak usaha manusia itu sendiri.”¹⁰⁴

Secara global, kemiskinan yang terjadi kebanyakan bukan karena tidak adanya produksi barang kebutuhan, namun lebih disebabkan oleh distribusi yang timpang. Sebagai contoh seperti yang diungkapkan oleh Bank Dunia bahwa 16,5 % penduduk dunia tinggal di belahan Utara, namun mereka menguasai 2/3 kekayaan dunia.¹⁰⁵ Ketimpangan itu juga disebabkan oleh aliran dana yang tidak seimbang antara negara-negara maju dan negara-negara ketiga. Ul Haq mengungkapkan bahwa kredit dana cadangan internasional yang diberikan kepada negara-negara ketiga tidak lebih dari 4 % dari total dana cadangan, padahal penduduk di dunia ketiga lebih dari 70 % penduduk dunia.¹⁰⁶

Ketimpangan juga terjadi di Indonesia. Menurut Dr. Sri Bintang Pamungkas, 77 % pendapatan nasional (PDB) tahun 1992 dikuasai hanya oleh 200 konglomerat.¹⁰⁷ Ini berarti pendapatan sebesar 23 % PDB dibagi ratusan juta penduduk. Ketimpangan juga terjadi antara daerah-daerah di

¹⁰³ Mahbub Ul Haq, *Tirai Kemiskinan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1983, hal. 46.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 57.

¹⁰⁵ Yusanto, *Op. Cit.* hal. 175

¹⁰⁶ Ul Haq, *Op. Cit.* hal. 179

¹⁰⁷ Sri Bintang Pamungkas, “*Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*”, dalam Awan Setya, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995. hal. 49

Jawa dan luar Jawa. Distribusi pendapatan di daerah luar Jawa jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan di Jawa. Tercatat bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah di Pulau Jawa sebesar 70% dari total PDRB seluruh Indonesia, sedangkan yang 30 % terbagi di berbagai daerah di luar Pulau Jawa.¹⁰⁸

Jika melihat angka Survey Biaya Hidup tahun 1999, maka akan terlihat bahwa di DIY juga terjadi ketimpangan yang cukup mencolok, yaitu 7,67 % keluarga mendominasi PDRB Yogyakarta tahun 1999.

Oleh karena itu, pemerataan atau distribusi pendapatan adalah sesuatu yang harus segera dilakukan. Memang benar bahwa produksi juga merupakan sesuatu yang penting, namun pada kenyataannya yang menjadi persoalan terjadinya kemiskinan adalah lebih pada faktor pemerataan, bukan pada faktor produksi.

(2). Kemiskinan dan Kepadatan Penduduk

Kemiskinan yang terjadi biasanya sering dikaitkan dengan kepadatan penduduk. Hal ini mungkin karena terpengaruh oleh teori Robert Maltus (1766-1834) yang dituangkan dalam bukunya *Essay on Population*. Maltus mengatakan bahwa reproduksi manusia cenderung bertambah menurut deret ukur, sementara pasokan bahan pangan hanya bertambah menurut deret hitung.¹⁰⁹ Dengan pandangan teori Maltus

¹⁰⁸Badan Statistik Jakarta 2001

¹⁰⁹ Yusanto, *Op. Cit.* hal. 224.

tersebut, maka tidak jarang orang selalu mengaitkan kepadatan penduduk dengan kemiskinan.

Pendapat-pendapat yang mengaitkan kemiskinan dengan kepadatan penduduk tersebut dikritik oleh Susan George, bahwa kelaparan tidak ada kaitannya dengan kelebihan penduduk. Di Bolivia dengan kepadatan penduduk hanya 5 orang per km², di sana terjadi kelaparan. Juga di India, dengan kepadatan 172 orang per km², terjadi kelaparan. Namun, hal ini tidak terjadi di Belanda, dengan kepadatan penduduk 326 orang per km².¹²³

Negara-negara dunia ketiga, untuk tidak menyebut negar miskin, sering dijadikan contoh untuk menekan jumlah penduduk dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ul Haq mengatakan: “Negara miskin geram sekali karena kenaikan penduduknya selalu saja disalahkan, dianggap penyebab timbulnya tekanan atas sumber daya. Sebenarnya tekanan itu timbul bukan karena ledakan penduduk di negara miskin, melainkan karena pola konsumsi di negara kaya. Tidak ada tanda-tanda bahwa tekanan atas sumber daya dunia akan turun berapa pun cepatnya penurunan laju pertumbuhan penduduk dunia ketiga. Kenaikan penduduk di negara-negara maju menghabiskan sumber daya 8 kali lipat lebih besar dibandingkan sumber daya yang dihabiskan akibat kenaikan penduduk dunia ketiga.”¹²⁴

Memang betul untuk kasus di Lembah Code yang kepadatan penduduknya mencapai 30.000 orang/km²,¹²⁵ terjadi kemiskinan sebesar 88,4%. Namun, kemiskinan yang terjadi bukan karena kepadatan

¹²³ Jalaludin Rakhmat, *Kunci Surga Yang Terbuang*, Bandung: Mizan, 1985, hal. 12.

¹²⁴ Ul Haq, *Op. Cit.* hal. 14

¹²⁵ Perhitungan ini meliputi RT 1,2,17-20, 23-28 berdasarkan kartu C1 di kelurahan.

penduduknya, melainkan lebih disebabkan faktor yang lain. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara umum, kemiskinan yang terjadi tidak seiring dengan kepadatan penduduk. Kota Yogyakarta dengan kepadatan penduduk 12.206 orang/km², mempunyai penduduk miskin sebesar 40,6 %, sedangkan Gunung Kidul yang kepadatan penduduknya hanya 451 orang/km² justru penduduk miskin lebih banyak, yaitu sebesar 63 %. Dengan demikian, kepadatan penduduk bukanlah penyebab kemiskinan.

Sebagai orang yang beriman harus meyakini bahwa setiap makhluk mempunyai rizki. Namun, kadang-kadang rizki tersebut tidak sampai kepadanya karena berbagai sebab.

Allah berfirman:



وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memenuhi rizkinya (QS. Hūd [11]: 6).¹²⁶

Demikian juga Allah menjanjikan kemakmuran bagi orang-orang yang taat pada tuntunan Allah. Allah berfirman:

ولو أن أهل القرى ءامنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi” (QS. Al A’rāf [7]: 96).¹²⁷

Dengan dasar keimanan dan didukung dengan fakta-fakta yang ada, maka sebenarnya kemiskinan yang terjadi sangat dipengaruhi oleh faktor distribusi, dan bukan oleh jumlah penduduk.

¹²⁶ Depag R.I., *Op. Cit.* hal. 327

¹²⁷ *Ibid.* hal. 237

(3). Kebudayaan kemiskinan

Betapa besarnya angka kemiskinan yang terjadi di Lembah Code, dan dengan penghasilan yang sangat rendah, yaitu 88,4 % pendapatan keluarga di bawah Rp 550.000,00/bulan. Yang termasuk paling miskin ada 51,7 %, yaitu dengan penghasilan keluarga di bawah Rp 300.000,00/bulan. Patut menjadi bahan renungan tentang kemampuan mereka untuk bertahan hidup dengan penghasilan sangat minim.

Hal seperti itu juga diungkapkan oleh Oscar Lewis bahwa di dalam masyarakat miskin terdapat kebudayaan kemiskinan yang mencerminkan pola kehidupan dan serangkaian penyelesaian praktis untuk menangani masalah-masalahnya, oleh karena itu, ia menjalankan fungsi adaptasi yang signifikan.¹²⁸ Parsudi Suparlan menyebutnya sebagai adaptasi yang mencerminkan upaya untuk mengatasi keputus-asaan.¹²⁹ Sebuah keluarga miskin acapkali mampu untuk tetap *survive* dan tentunya juga memungkinkan untuk bangkit kembali jika mereka memiliki jaringan atau pranata sosial yang melindungi dan menyelamatkannya.¹³⁰

Dari beberapa kali pelatihan yang dilakukan ternyata hasilnya masih sangat minim. Kecilnya angka keberhasilan pembinaan usaha tersebut tentunya sangat terkait dengan faktor-faktor yang lainnya, seperti jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*), keuletan dalam usaha, hasil dari usaha tersebut yang belum memadai sehingga kemudian ditinggalkan,

¹²⁸ Suparlan, *Op. Cit.* hal. 17.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Suyanto, *Op. Cit.*, hal. xvii.

atau uang yang seharusnya digunakan untuk pengembalian modal justru habis terpakai untuk menutup kebutuhan hidup yang mendesak.

Menumbuhkan rasa percaya diri, kreatif dan inovatif memang bukanlah persoalan yang mudah. Seperti dikemukakan oleh David C. Mc. Clelend bahwa masyarakat miskin tidak hanya mempunyai masalah dalam ekonomi saja, namun juga dalam mental dan budaya, yaitu tidak adanya “*n-Act*” (*Need for Achievement*), yaitu sikap mental yang kuat untuk meraih hasil atau berprestasi.¹³¹ Di samping itu, adanya sikap-sikap merasa dirinya rendah, perasaan kurang berharga, tidak berdaya dan ketergantungan yang tinggi juga menjadi kendala tersendiri dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam masyarakat miskin justru ada perangkap yang sangat kuat, yang oleh Robert Chamber disebut (*deprivation trap*) atau perangkap kemiskinan. Perangkap itu terdiri atas 5 hal, yaitu:

1. Kemiskinan itu sendiri
2. Kelemahan fisik
3. Keterasingan atau isolasi
4. Kerentanan
5. Ketidakberdayaan.

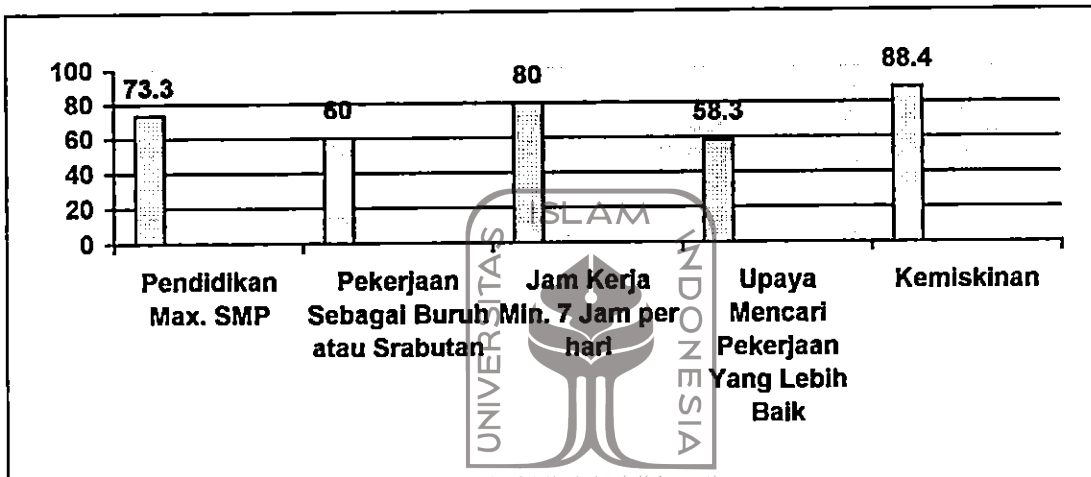
Dari kelima jenis perangkap kemiskinan tersebut, perangkap yang paling utama adalah kerentanan dan ketidakberdayaan.¹³²

¹³¹ Sanusi, *Op. Cit.* hal. 24.

¹³² Chamber Robert, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang?*, Jakarta : LP3ES, 1987, hal. xv.

Ketidakberdayaan itu dapat dijelaskan dengan melihat fakta-fakta kondisi responden yang memang memprihatinkan. Rangkuman fakta-fakta itu dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini.

GAMBAR 3
GAMBARAN KONDISI MASYARAKAT CODE (%)



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden, yaitu 73,3%, hanya berpendidikan maksimal SLTP, dan 40 % maksimal SD. Dari sana dapat dipahami jika kemudian jenis pekerjaannya pun sebagian besar (60%) adalah buruh atau *srabutan*. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, mereka pun belum berhasil mencari pekerjaan yang lebih baik, walaupun sebagian besar responden (58,3 %) sebenarnya sudah berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik, namun belum juga berhasil. Oleh karena itu, meski jam kerja responden cukup tinggi, yaitu min 7 jam dalam sehari, namun karena pekerjaannya memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang tinggi, maka angka hasil yang diperoleh pun tetap rendah. Dengan demikian, kemiskinannya pun tetap tinggi, yaitu 88,4%.

Akumulasi keterbatasan-keterbatasan dari masyarakat, tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi yang ada sekarang ini. Kenyataan-kenyataan demikian menunjukkan bahwa antara faktor yang satu dengan yang lain merupakan hubungan yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Sederet kelemahan yang saling terkait yang melingkupi masyarakat miskin itu kemudian dikenal dengan istilah *a built-in vicious circle of poverty* atau lingkaran kemiskinan yang tidak berujung, yang ditumbuhkan dari dalam.¹³³

GAMBAR 4
LINGKARAN KEMISKINAN (*VICIOUS CIRCLE OF POVERTY*)*



* Dirujuk dari Adi Sasono, *Op. Cit.* hal. 40

Dari gambar *vicious circle of poverty* (lingkaran kemiskinan) tersebut dapat dijelaskan bahwa : “Oleh karena mereka miskin, maka menyebabkan produktivitasnya rendah dan pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan mereka juga rendah. Oleh karena pendapatannya rendah, maka daya tawarnya (*bargaining power*) juga rendah. Karena daya

¹³³ Sasono, *Op. Cit.*, hal. 40

tawar mereka rendah, maka kemudian akan menyebabkan kemiskinan.”
Demikian perputaran itu berjalan terus tanpa ujung.

Untuk itulah harus dimulai dari memutus mata rantai tersebut, dan yang paling mendasar untuk diubah adalah menumbuhkan motivasi untuk berprestasi (*need for Achievement*). Menumbuhkan keaktifan dalam bekerja, motivasi yang tinggi, memang bukan merupakan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendorong yang kuat. Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi, tidak ada yang lebih kuat dari faktor dorongan keimanan. Oleh karena itulah, dalam perspektif Islam seseorang akan gigih bekerja karena di dalam dirinya ada dorongan untuk mencari karunia Allah.

Rasul bersabda:

ما اكل احدكم طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده

“Tidaklah seorang di antara kamu, makan suatu makanan, lebih baik daripada memakan dari hasil keringatnya sendiri”
(HR. Baihaqi).¹³⁴

Dengan dorongan keimanan tersebut maka dapat ditumbuhkan inovasi dan kreasi yang kuat dalam diri seseorang, sehingga orang tersebut mampu mewujudkan usaha dengan jerih payahnya sendiri.

Pada masyarakat Code dorongan keimanan dalam melakukan aktivitas keseharian belum tampak. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya responden yang melakukan aktivitas ibadah keagamaan, yaitu hanya 24,1 %. Oleh karena itu, upaya untuk menumbuhkan kesadaran keagamaan sangat dibutuhkan, sebab dorongan akidah atau keimanan (*al quwwah ar*

¹³⁴ Al Badri, *Op. Cit.* hal. 26

rūhiyah) dapat menumbuhkan motivasi yang tinggi, atau bahkan menjadi pendorong paling kuat diantara pendorong-pendorong yang lain, baik itu dorongan materi (*al-quwwah al-mādiyah*) maupun dorongan maknawiyah (*al quwwah al-ma'nawiyah*) seperti dorongan kesukuan dan kebangsaan.

Namun demikian, betapa pun kuatnya motivasi jika tidak didukung oleh kemampuan diri, penanggulangan kemiskinan yang sudah sedemikian rumit akan mengalami banyak kesulitan. Oleh karena itulah, peran negara dalam menyelenggarakan pendidikan yang memungkinkan semua orang mampu mengakses adalah menjadi sesuatu yang sangat diperlukan.

Pada masa perjalanan sejarah Islam, Umar bin Khaththab tidak membiarkan masyarakat menanggung sendiri beban hidupnya. Berpegang pada prinsip bahwa seorang pemimpin, dalam hal ini adalah negara, adalah penanggung jawab, maka Umar membebaskan biaya pendidikan bagi rakyatnya, dan beliau pun menggaji gurunya dengan gaji yang tinggi yaitu 15 dinar emas (kurang lebih 64 gram) per bulan.¹³⁵

Dengan contoh yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab tersebut, dapat menjadi bahan renungan bahwa dengan fakta-fakta rendahnya pendidikan di masyarakat menunjukkan rendahnya peranan negara dalam fungsinya sebagai *penanggung jawab*.

Dalam budaya kemiskinan faktor-faktornya sudah sedemikian kompleksnya, dan hal ini tidak hanya menyangkut diri mereka sendiri, namun juga menyangkut faktor di luar diri mereka. Bagong Suyanto mengungkapkan bahwa masalah kemiskinan bukanlah semata-mata karena golongan miskin tersebut bersikap boros, atau tidak memiliki etos kerja

¹³⁵ Abdurrahman Al Baghdadi, *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*, Bangil: Al Izzah, 1996, hal. 59

yang baik, namun problem mendasarnya adalah karena mereka terlilit dan masuk ke dalam perangkap kemiskinan yang parah.¹³⁶

Apabila budaya kemiskinan itu yang terjadi, maka budaya itu akan menjadi cara hidup, yang juga merupakan adaptasi terhadap kesulitan hidup. Kebudayaan ini kemudian akan diturunkan dari generasi ke generasi. Namun demikian, di samping nilai-nilai negatif dari budaya kemiskinan yang menyangkut kelumpuhan ekonomi, kelangkaan sumber daya, tetapi dalam beberapa hal juga bersifat positif, karena memberikan jalan keluar bagi kaum miskin untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya.

Untuk itu Adi Sasono memberikan gambaran tentang pengentasan kemiskinan melalui apa yang disebutnya dengan Gerakan Kebudayaan, yaitu gerakan perubahan yang tidak hanya sebagai fenomena ekonomi saja, namun juga menyangkut pemerintahan, dan bahkan merupakan keseluruhan upaya pengembangan swadaya masyarakat ke arah transformasi perilaku, struktur, dan tata nilai. Hal ini tentunya dilakukan melalui *berbagai langkah kecil dalam skala masal dan tempo yang panjang*.¹³⁷

Lebih jauh Romo Mangun Wijaya, budayawan yang pernah tinggal di Lembah Code menegaskan bahwa **“mereka itu sebenarnya bukan orang miskin, tetapi dibuat miskin oleh struktur.”**¹³⁸ Oleh karena itu, perubahan yang harus dilakukan pun harus perubahan struktural. Namun, hal ini tidak akan terjadi kecuali harus diubah dengan cara-cara yang **revolusioner**, yaitu dengan **perubahan struktural yang mendasar**.

¹³⁶ Suyanto, *Op. Cit.*, hal xx.

¹³⁷ Sasono, *Op. Cit.*, hal. 42

¹³⁸ Jalaluddin Rahmat, “*Sufi dan Kemiskinan*”, dalam Sri Edi Swasono, *Op. Cit.*, hal. 23.

Dengan demikian, kaum miskin merasa memiliki kekuatan dan memiliki kepemimpinan.¹³⁹

(4). Perlindungan Negara terhadap Rakyat

Persaingan dalam mencari pekerjaan yang layak terasa sangat keras. Dari 58,3 % responden yang sudah berupaya mencari pekerjaan yang lebih baik, hanya 27,5 % yang mendapatkan pekerjaan baru. Itu pun bukan berarti pekerjaannya sudah layak untuk menopang kebutuhan hidup. Hal itu dapat diketahui dari jenis pekerjaan yang ada sekarang, yaitu sebagian besar tetap sebagai buruh. Artinya, orang tersebut hanya berpindah kerja dari buruh yang lama kepada pekerjaan buruh yang baru.

Di sinilah harusnya ada peran negara untuk menciptakan peluang pekerjaan, sehingga pencari kerja akan terserap untuk bekerja secara layak. Namun, kenyataannya bahwa persaingan tenaga kerja sudah sedemikian berat.

Dalam hal yang lain, yaitu dalam menghadapi persaingan usaha, kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah tentunya sangat sulit untuk berhasil dalam menjalani persaingan. Mereka dengan segala keterbatasannya harus berhadapan dengan pengusaha-pengusaha yang sudah jalan, atau bahkan dengan pengusaha yang besar.

Prof. Mubyarto mengungkapkan persaingan antara pengusaha-pengusaha tradisional dengan pengusaha yang modern dan berskala besar. Di satu pihak ekonomi sektor modern atau ekonomi kapitalistik maju pesat karena pemerintah menciptakan iklim yang bebas. Namun, di pihak lain perekonomian rakyat atau sektor tradisional sulit berkembang, karena

¹³⁹Suparlan, *Op. Cit.*, hal. 19

sektor ini dengan segala ketradisionalannya, kemudian tersingkirkan karena persaingan bebas yang berjalan tidak seimbang.¹⁴⁰

Lebih jauh Mubyarto menjelaskan perlunya adanya perlindungan terhadap pengusaha-pengusaha kecil, karena memang sudah menjadi tanggung jawab negara untuk membantu usaha rakyatnya dalam memenuhi kebutuhannya, khususnya kebutuhan pokok. Mubyarto mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi kita menghendaki adanya perlindungan yang sungguh-sungguh terhadap usaha kecil, sebagaimana pemerintah telah memberikan proteksi terhadap industri dalam negeri yang sedang tumbuh pada awal industrialisasi.¹⁴¹

Intervensi pemerintah guna mengentaskan problem kemiskinan yang menjerat rakyat adalah sesuatu yang terpuji dan intervensi ini sifatnya untuk memberdayakan ekonomi rakyat melalui pemberian kemudahan-kemudahan dan yang lebih penting lagi adalah keberpihakan pemerintah kepada mereka agar daya saingnya dapat meningkat. Tidaklah *fair* jika menilai kegagalan-kegagalan yang ada selalu sepenuhnya tertuju pada kelompok miskin yang ingin berusaha bangkit tadi. Bagaimana mereka akan bangkit jika beban awal yang harus dipikulnya memang cenderung tidak sanggup untuk diangkat.

Prof. Suryawasita menegaskan bahwa kemiskinan yang ada lebih jauh karena kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang bertolak dari keadaan struktur sosial yang eksploitatif dalam pola hubungan atau institusi-institutsi ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya.¹⁴² Bahkan M. Dawam Raharjo menyatakan bahwa kemiskinan yang ada di masyarakat

¹⁴⁰Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996, hal. 6.

¹⁴¹*Ibid.* hal. 24

¹⁴² Sanusi, *Op. Cit.* hal. 27.

lebih disebabkan oleh eksploitasi.¹⁴³ Oleh karena itu Mubyarto mengatakan bahwa kepada ekonomi konglomerat, pemerintah perlu mengendalikan; sedangkan kepada ekonomi rakyat, pemerintah perlu memberdayakan (*empowering*).¹⁴⁴

Negara dalam hal ini harus membantu rakyatnya yang sedang dalam kondisi serba sulit dalam menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Rasulullah sendiri pernah memberi modal kerja kepada seseorang yang tidak punya modal usaha.

Diceritakan bahwa :

*“Ada seseorang yang mencari Rasulullah saw., dengan harapan Rasulullah akan memperhatikan masalah yang dihadapinya. Ia adalah seorang yang tidak mempunyai sarana yang dapat digunakan untuk bekerja agar mendapatkan hasil. Dia juga tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Kemudian Rasulullah memanggilnya. Beliau menggenggam sebuah kapak dan sepotong kayu, yang diambil oleh beliau sendiri, kemudian beliau menyerahkan kepada orang tersebut. Beliau memerintahkan kepadanya agar ia pergi ke suatu tempat yang telah ditentukan, agar ia bekerja di sana dengan sarana itu, dan nanti kembali lagi memberi kabar tentang keadaannya. Setelah beberapa waktu, orang itu mendatangi Rasulullah seraya mengucapkan terima kasih kepada beliau atas bantuannya. Ia lalu menceritakan tentang kemudahan yang kini ia dapati.*¹⁴⁵
(Diriwayatkan oleh Imam Bukhari).

Peristiwa di atas adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya yang tidak mampu melakukan usaha karena keterbatasannya. Beliau melarang orang memiliki budaya malas dan selalu menggantungkan kepada orang lain. Beliau juga memberikan motivasi untuk belanja yang sekaligus memberikan sarana untuk usaha. Demikian

¹⁴³M. Dawam Raharjo, *Esei-esei Ekonomi Politik*, Jakarta : LP3ES, 1983, hal. 196.

¹⁴⁴Mubyarto, *Op. Cit.* hal. 26.

¹⁴⁵Al Badri, *Op. Cit.*, hal. 28.

juga Rasulullah menunjukkan tempat untuk berusaha agar usahanya tadi dapat berhasil, dan meminta orang tersebut untuk datang kembali guna memberi kabar tentang apa yang telah ia usahakan. Hal tersebut merupakan sebuah kontrol terhadap kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut, apakah orang tersebut berhasil atau belum. Dengan demikian, terhadap peristiwa di atas sebenarnya Rasulullah telah melakukan pembinaan usaha yang luar biasa, mulai dorongan/motivasi, pemberian sarana-usaha, sampai kepada manajemen.

(5). Distribusi Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, An Nabhani menjelaskan pemerataan atau distribusi kekayaan sebagai salah satu pilar penting di samping pilar kepemilikan dan pengembangan harta. Islam telah memperbolehkan adanya kepemilikan individu (*milkiyah fardiyah*), dan juga mewajibkan kepemilikan umum (*milkiyah 'āmah*) menjadi milik semua rakyat. Negara dalam hal ini hanya menjadi pengelola saja, bukan memiliki.¹⁴⁶

Kepemilikan umum merupakan salah satu pemasukan negara yang sangat besar, sehingga dengan berjalannya fungsi kepemilikan umum tersebut, negara akan mampu melindungi rakyatnya dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok.

¹⁴⁶ An Nabhani, *Op. Cit.* hal. 271

Rasulullah saw. bersabda :

ثلاثة لا يمتنع الما والكلأ والنار

“Tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki oleh siapa pun), yaitu air, padang gembalaan, dan api”
(HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).¹⁴⁷

Salah satu contoh kepemilikan umum adalah barang tambang yang jumlahnya relatif banyak. Tambang tembaga di Irian Jaya, misalnya. Di dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan tambang tembaga tersebut seharusnya menjadi milik umum (rakyat), sehingga tidak boleh dimiliki oleh swasta, terlebih lagi swasta asing. Seharusnya negaralah satu-satunya yang berhak mengelola. Hasil dari penambangan tersebut sepenuhnya diberikan kepada rakyat atau sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, orientasi penambangan tersebut bukan mencari keuntungan (*profit*), melainkan murni diberikan seluruhnya kepada rakyat secara cuma-cuma, atau dana hasil penambangan tersebut diberikan kepada rakyat sebagai pemiliknya.

Menurut Rizal Ramli, Direktur Econit Advisor Group, Saham PT. Freeport Indonesia terbagi menjadi 85,87 % dimiliki oleh Freeport Mc. Moran, 9,36 % milik Pemerintah Indonesia, dan 4,77 % milik PT. Indocopper Investama Corp (IIC), anak perusahaan Bakrie.¹⁴⁸ PT. Freeport sejak tahun 1981 telah memproduksi tembaga sebesar 1.120 ton per hari,

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Harian Kompas*, 16 Oktober 1998

73,5 kg emas, dan 168 kg perak.¹⁴⁹ Jika produksi berjalan normal, maka dari perolehan emasnya saja sampai dengan tahun 2001 sudah mencapai 529,2 ton emas. Semua itu seharusnya menjadi milik rakyat, bukan menjadi milik swasta atau bahkan perusahaan asing.

Contoh kepemilikan umum yang lain adalah hutan (padang gembalaan). Hasil hutan Indonesia pada tahun 2000 mencapai \$ 7 milyar.¹⁵⁰ Namun, sayangnya adalah bahwa 83 % dari hasil hutan tersebut masuk ke pihak pengusaha, dan hanya 17 % sisanya yang masuk ke kas negara.¹⁵¹

Termasuk dalam kepemilikan umum adalah sumber energi, baik itu minyak, gas bumi, listrik, maupun juga batu bara, yang semua itu tercakup dalam “api”. Oleh karena itu, dalam sistem Islam pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak boleh diswastakan, dan juga tidak berorientasi pada *profit*, karena negara sifatnya hanya mengelola milik rakyat, bukan milik negara. Oleh karena itu, tidak akan ada ide pencabutan subsidi BBM, karena memang hal itu adalah sepenuhnya milik rakyat dan harus diberikan kepada rakyat secara cuma-cuma atau dengan harga yang murah.

Dari pilar kepemilikan umum ini saja rakyat akan mendapatkan banyak kemudahan dalam mendapatkan barang-barang yang memang sebenarnya adalah milik rakyat. Dengan diterapkannya pilar kepemilikan

¹⁴⁹ *Harian Republika*, 23 Oktober 1998

¹⁵⁰ *Harian Kompas*, 10 Februari 2001

¹⁵¹ Yusanto, *Op. Cit.* hal. 210

ini, maka pemerataan kesejahteraan akan menjadi lebih mudah, karena beban kebutuhan-kebutuhan yang pokok sudah berkurang.

Pada diri masing-masing anggota masyarakat juga ditanamkan dorongan giat bekerja untuk mencari rizki dengan didasari keimanan. Dengan demikian, seseorang diharapkan akan bekerja dengan penuh semangat karena dorongan ketakwaan kepada Allah.

Allah berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan” (QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 77).¹⁵²

Namun demikian, apabila kondisi seseorang di antara anggota masyarakat, dengan keterbatasannya masih mengalami kemiskinan, maka karib kerabatnya harus ikut bertanggung jawab.

Allah berfirman:

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya” (QS. At-Tālaq [65] : 7).¹⁵³

Manakala karib kerabat juga belum mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, maka negara wajib menjamin

¹⁵² Depag R.I., *Op. Cit.* hal. 623

¹⁵³ *Ibid.* hal. 946

terpenuhinya kebutuhan pokoknya, baik melalui pemberian secara langsung, maupun melalui penjagaan terhadap sistem yang kondusif untuk terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat.

Adapun langkah-langkah negara, selain langkah penegakan pilar-pilar ekonomi Islam di atas, peran negara dalam menjaga sistem agar terpenuhinya kesejahteraan masyarakat antara lain adalah:

a). Larangan terhadap penimbunan harta

Islam melarang penimbunan harta, walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Hal itu dimaksudkan agar harta itu dapat beredar di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat diambil manfaatnya. Penggunaan harta tadi dapat dilakukan oleh ia sendiri ataupun dengan jalan bekerja sama dengan orang lain melalui syirkah.

Allah berfirman:

والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقوها في سبيل الله فبشرهم بعباب اليم

“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan siksaan yang pedih”
(QS. At-Taubah [9]: 34)¹⁵⁴

Oleh karena itu, dengan berputarnya harta di tengah-tengah masyarakat maka akan menggerakkan roda ekonomi, yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan.

b). Mengupayakan agar harta tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja, sementara kelompok yang lain tidak mendapat kesempatan.

¹⁵⁴ Depag R.I., *Op. Cit.* hal. 283

Allah berfirman:

كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم

“Agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu” (QS. Al-Hasyr [59]: 7).¹⁵⁵

Seperti yang terjadi di beberapa tempat, bahwa terkonsentrasinya modal di wilayah tertentu saja, maka akan menimbulkan kemakmuran hanya di wilayah tersebut, sementara di wilayah lain akan terjadi kemiskinan. Hal ini akan menjadikan ketimpangan pendapatan. Sebagaimana diungkapkan oleh Yusanto bahwa 70 % dana di Indonesia beredar di Jakarta.¹⁵⁶

c). Melarang praktik ekonomi ribawi

Perilaku riba dinyatakan oleh Allah sebagai sikap bermusuhan dengan Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman:

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم

“Jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu” (QS. Al-Baqarah [2]: 279).¹⁵⁷

Ibnu Taimiyah mengemukakan keras praktik bunga bank dengan mengatakan bahwa: “Praktik bunga sangat jelas dilarang dalam

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal. 916

¹⁵⁶ Yusanto, *Op. Cit.* hal. 230

¹⁵⁷ Depag R.I., *Op. Cit.* hal. 70

Al Qur'an dan tidak ada perbedaan pendapat di antara penganut Islam tentang masalah ini."¹⁵⁸

d). Melindungi rakyat dari tindakan curang

Ketidakadilan dalam usaha ataupun perdagangan merupakan kecurangan, dan hal ini berarti pelanggaran terhadap hukum syari'at Islam. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Bambang Sudibyo, bahwa ketidakadilan itu biasanya dalam bentuk tidak adilnya dalam masalah akses keuangan. Di satu pihak mendapat kucuran dana yang melimpah, sementara di lain pihak sulit untuk mendapatkan dana.¹⁵⁹ Dengan adanya budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka kecurangan akan menjadi-jadi.

Indikasi kecurangan juga terjadi pada proyek-proyek bantuan untuk Lembah Code, seperti diungkapkan oleh Bapak Siswa Sukarjo, bahwa pembangunan talut (dinding sungai) yang dilakukan beberapa waktu yang lalu dengan bantuan pemerintah, namun pembangunan tersebut baru berjalan beberapa meter, proyek itu pun sudah berhenti karena dana yang disediakan tidak tahu ke mana hilangnya.¹⁶⁰ Demikian juga terjadi ketika ada bantuan pelatihan pertukangan kayu pada tahun 1998, ketika Bapak Totok Sukarjita selaku ketua pelaksana lapangan. Beliau mengakui banyak terjadi kecurangan dalam pendanaan, dan beliau tidak dapat berbuat banyak.¹⁶¹

¹⁵⁸ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997, hal. 162

¹⁵⁹ Bambang Sudibyo dalam Awan Setya, *Op. Cit.* hal. 22

¹⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Siswa Sukarjo, pada tgl. 25 Agustus 2002

¹⁶¹ Wawancara dengan Bapak Totok Sukarjita, pada tanggal 20 Agustus 2002

Allah swt. telah memperingatkan dengan keras terhadap orang yang berlaku curang.

Allah berfirman:

ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت

“Barang siapa yang berbuat curang, pada hari kiamat ia akan datang membawa hasil kecurangannya. Kemudian setiap orang menerima balasan yang setimpal atas semua yang telah dilakukannya” (QS. Ali Imran[3]: 161).¹⁶²

Kecurangan dalam banyak hal memang telah menjadikan seseorang menjadi kaya, namun di pihak lain menjadikan malapetaka. Oleh karena itu, Islam melarang keras tindak kecurangan tersebut, dan bahkan menganggap hasil yang didapat dari tindak kecurangan tersebut sebagai barang yang haram. Yang dimaksud kekayaan dari hasil kecurangan, dalam hal ini korupsi ataupun kolusi adalah semua hasil yang diterima oleh seorang pejabat atau pegawai (baik rendah maupun tinggi) karena ia telah menjalankan suatu pekerjaan atau kebijakan tertentu, yang sebenarnya pekerjaan itu sudah menjadi tugasnya sebagai pejabat publik.¹⁶³

Dalam sejarah Islam, Umar bin Khaththab telah membuat peraturan yang mengharuskan para pejabat publik untuk diketahui terlebih dahulu jumlah harta kekayaannya tatkala mulai menjabat. Kemudian pada akhir masa jabatannya, harta kekayaan pejabat tersebut

¹⁶² Depag R.I., *Op. Cit.* hal. 104

¹⁶³ Jurnal Al-Wa'ie No. 21, Bogor: Hizbut Tahrir Indonesia, 2002, hal. 27

dihitung kembali. Apabila terdapat kelebihan, setelah dikurangi gaji atau tunjangan selama masa jabatannya, maka Umar tidak ragu-ragu mengambil keputusan tegas. Tercatat bahwa Umar pernah mengangkat Muhammad bin Maslamah menjadi pejabat yang bertugas untuk mengawasi harta kekayaan para pejabat negara. Berdasarkan laporan Muhammad bin Maslamah itulah kemudian Umar mengambil keputusan untuk membagi dua kekayaan Abu Hurairah, yang pada waktu itu sebagai Gubernur/penguasa di Bahrain. Demikian juga kekayaan Amr bin Ash, Gubernur Mesir; Nu'man bin'Adi, Gubernur Irak; Nafi' bin 'Amr al Khuza'i, Gubernur Makkah; Ya'la bin Munabbih, Gubernur Yaman; Sa'ad bin Abi Waqash, Gubernur Kuffah; Khalid bin Walid, Gubernur Syam. Keputusan Umar tersebut bukan berarti para Gubernurnya itu korupsi, namun berdasarkan pemahaman beliau harta tersebut harus dikembalikan kepada negara. Bahkan beliau juga pernah mengambil seluruh keuntungan dari penjualan kambing milik putranya, 'Abdullah, dan menyerahkannya ke *Bait Al-Māl*. Tindakan itu diambil karena 'Abdullah telah menggembalakan kambingnya di tanah milik negara, sehingga kambing-kambing itu gemuk-gemuk.¹⁶⁴

Tindakan Umar yang tegas itu juga diberitakan oleh Zaid bin Aslam yang menuturkan bahwa ayahnya berkata:

¹⁶⁴ *Ibid.* hal. 28.

“Umar mengatakan kepada kami, ‘Aku mengetahui harta kekayaan yang kalian peroleh. Jika di antara kalian ada yang memiliki harta dan berasal dari kekayaan negara, yang berada dibawah pengawasan kami, maka janganlah menggampangkannya walaupun berupa pelana keledai atau tali pelana unta. Sebab, semua itu adalah milik kaum muslimin, dan setiap orang mempunyai bagian di dalamnya.”¹⁶⁵

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa keadilan di dalam Islam sangat diperhatikan, khususnya tentang hak atas harta. Seorang pejabat tidak boleh membeda-bedakan peluang bagi seluruh warganya khususnya dalam hal akses keuangan. Bahkan bagi negara wajib untuk membantu warga negaranya yang sangat membutuhkan bantuan.

Kecurangan yang lain di antaranya adalah ketidakadilan yang menurut Adi Sasono terwujud dalam bentuk pungutan pajak yang akhirnya memberatkan rakyat kecil.¹⁶⁶ Pajak yang dikenakan dalam industri ataupun perdagangan pada akhirnya akan dipikul oleh konsumen, karena beban pajak yang dikenakan kepada industri ataupun perdagangan akan dimasukkan dalam biaya produksi. Oleh karena itu, harga produksi barang dengan sendirinya akan menjadi naik. Dengan demikian, pedagang kecil ataupun konsumen yang membeli barang hasil industri atau perdagangan tersebut pada hakikatnya telah menanggung pajak tersebut.

Dalam sistem ekonomi Islam, pajak (*darībah*) hanya dipungut ketika kas negara dalam keadaan kekurangan atau kosong. Demikian juga pajak tidak dikenakan kepada semua orang atau semua barang

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Sasono, *Op. Cit.* hal. 39

produksi, namun hanya dikenakan kepada orang-orang yang kaya saja, sampai kebutuhan yang diperlukan oleh negara terpenuhi, dan setelah itu pajak akan dihentikan.¹⁶⁷ Hal ini dimaksudkan agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, namun dapat dinikmati oleh semua masyarakat.

- e). Negara mengupayakan terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia (SDM)

Negara mempunyai peran yang sangat pokok dalam terciptanya sumber daya manusia yang handal. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan aktivitas yang akan meningkatkan kualitas SDM. Aktivitas tersebut antara lain menyelenggarakan pendidikan bebas bea di semua tingkatan, menciptakan peluang pekerjaan dengan menggalakkan aktivitas ekonomi di sektor riil dan menutup peluang ekonomi sektor nonriil. Pada masa Rasulullah saw. beliau telah memberikan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat, yaitu dengan membebaskan para tawanan perang Badar jika mereka telah mengajari baca tulis bagi setiap tawanan sebanyak 10 orang Madinah. Demikian pula Umar bin al-Khattab telah memberikan pendidikan bebas bea kepada rakyatnya. Bahkan pada masa pemerintahan Al Mansur, di samping menyelenggarakan pendidikan bebas bea, beliau bahkan memberikan imbalan kepada setiap pengarang buku berupa emas murni seberat buku yang dikarangnya.¹⁶⁸

¹⁶⁷ An Nabhani, *Op. Cit.* hal. 262

¹⁶⁸ Al Baghdadi, *Op. Cit.* hal. 66

Hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi pemerintahan yang ada sekarang. Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang pendidikan pada tahun 2000 hanya sebesar 2,9 milyar dari total pengeluaran pemerintah kota sebesar 243,8 milyar. Angka tersebut turun menjadi hanya 1,8 milyar pada tahun 2001. Demikian juga dalam bidang tenaga kerja. Pada tahun 2000 pengeluarannya hanya sebesar 121 juta dan pada tahun 2001 turun menjadi 103 juta. Namun, ironisnya adalah biaya perjalanan dinas pejabat yang pada tahun 2000 hanya sebesar 176 juta, namun pada tahun 2001 meningkat 15 kali lipat menjadi 2,7 milyar.¹⁶⁹ Hal tersebut di atas mencerminkan bahwa pemerintah tidak menaruh perhatian yang serius terhadap pendidikan dan ketenagakerjaan, dan bahkan lebih mengutamakan perjalanan dinas para pejabat. Padahal, sebagaimana tertera pada pasal 34 Undang-undang Dasar 1945, bahwa fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara, maka negara sudah seharusnya menaruh perhatian yang besar terhadap fenomena kemiskinan yang ada.

Dari kompleksnya permasalahan-permasalahan yang ada, tidak dapat dipungkiri bahwa peranan negara dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada, khususnya di Lembah Code, adalah sangat penting. Pemerintah tentunya tidak lagi melakukan ketidakadilan ekonomi, baik dalam pungutan pajak yang relatif memberatkan rakyat kecil, pertukaran yang tidak adil dalam perdagangan barang, maupun pembayaran yang tidak adil atas jasa pekerja,¹⁷⁰ atau bahkan tidak memiliki *sense of crisis* terhadap kondisi masyarakat. Jika hal ini terus terjadi maka semakin nyata apa yang

¹⁶⁹ Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2001.

¹⁷⁰ Sasono, *Op. Cit.* hal. 39

dikatakan oleh Rudolf H. Strohm bahwa mereka miskin karena memang dimiskinkan, dan pembangunan yang selama ini ada hanyalah *Entwickelung der Unterentwickelung* (pembangunan keterbelakangan).¹⁷¹

Negara mempunyai peran yang utama dalam pengentasan kemiskinan, sebagaimana halnya yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa: *"Perlu dicatat bahwa mengatur segala urusan masyarakat adalah sesuatu yang wajib, dan itu merupakan hal yang harus dilakukan (wājibat) oleh negara. Ad-dīn (Islam) ini sesungguhnya tidak bisa dibangun tanpa itu."*¹⁷²

Namun demikian, menanggulangi persoalan kemiskinan dengan sistem kapitalisme adalah sesuatu yang tidak mungkin tercapai, karena sistem ini hanya akan menghasilkan ketimpangan di tengah masyarakat. Hal ini juga diungkapkan oleh Umer Chapra bahwa: *"Kapitalisme maupun sosialisme, kendati mampu memperoleh kemewahan, namun gagal untuk merealisasikan tujuan kesejahteraan masyarakat yang dikehendaki. Ketimpangan makro ekonomi terjadi secara serius, dan bahkan secara umum menghadapi suatu krisis. Ini semua bukan disebabkan oleh hal-hal yang terjadi di luar sistem, namun lebih disebabkan oleh adanya cacat struktural yang inheren dalam sistem tersebut."*¹⁷³

¹⁷¹ Rakhmat, *Op. Cit.* hal. 26

¹⁷² Islahi, *Op. Cit.*, hal. 161.

¹⁷³ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, hal. 8

BAB V

PENUTUP

Simpulan

Dari analisis pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kemiskinan di daerah Lembah Code sudah cukup memprihatinkan, yaitu 88,4 % tergolong miskin. Dari jumlah tersebut 51,7 % tergolong pada tingkat *paling miskin*, atau *destitute* (parah), yaitu dengan penghasilan keluarga kurang dari Rp 303.750,00 per bulan.
2. Dengan kemiskinan yang mereka hadapi, masyarakat Lembah Code masih tetap mempunyai semangat untuk mengubah kondisi tersebut, yaitu 58,3 % berupaya mencari pekerjaan lain yang lebih baik; demikian juga rata-rata jam kerja mereka cukup tinggi, yaitu 80 % bekerja minimal 7 jam setiap hari.
3. Aktivitas keagamaan yang ada di masyarakat Lembah Code masih sangat rendah, yaitu hanya 24,1 % yang melakukan ibadah *ṣalāt* secara rutin. Namun demikian, sesuatu yang menggembirakan adalah mulai maraknya kegiatan pembinaan anak-anak ataupun remaja di masjid-masjid sekitar Lembah Code.
4. Faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang dominan adalah faktor struktural, yaitu kondisi sosial-ekonomi-politik yang tidak kondusif untuk mereka agar segera terentaskan dari kemiskinan. Namun demikian,

budaya kemiskinan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penyebab, tetapi hal ini lebih sebagai akibat dari faktor struktural.

5. Solusi pengentasan kemiskinan yang digunakan selama ini lebih menekankan pada perubahan kultural, dimana tanggung jawab bertumpu pada individu masyarakat. Karena faktor penyebab utama dari kemiskinan yang ada adalah struktural, maka solusi yang seharusnya digunakan adalah dengan perubahan struktural, baik merubah prinsip-prinsip kepemilikan, maupun prinsip distribusi. Oleh karena itu pihak yang paling bertanggung jawab adalah negara. Demikian juga negara saat ini sudah saatnya menjadikan sistem ekonomi Islam sebagai rujukan dalam perekonomian negara.



B. Saran

1. Mengajak kepada masyarakat di Lembah Code untuk bersama-sama meningkatkan motivasi untuk berlepas dari kemiskinan, yang diwujudkan dalam meningkatnya kreativitas dalam usaha, tidak mudah putus asa, serta berupaya untuk dekat kepada Allah (*taqarrub ilallah*) yaitu dengan menjalankan ibadah.
2. Hendaknya masyarakat peduli kepada fenomena kemiskinan yang ada.
3. Kepada pemerintah diharapkan mau mengubah paradigma, dari keberpihakan kepada ekonomi kuat menjadi keberpihakan kepada semua, termasuk kepada rakyat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Husain, *Mafāhim Islāmiyah*, Juz I, Beirut: Darul Bayariq, 1994.
- _____, *Mafāhim Islāmiyah*, Juz II, Beirut: Darul Bayariq, 1996.
- Abdul Hadi, Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al Iklash, 1998.
- Ahmad, Ziauddin, *Al-Qur'ān, kemiskinan dan Pemerataan*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima, 1998.
- Ala, Andre Bayo (editor), *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Al-Badri, Abdul Aziz, *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman, *Umatku Bangkit Bersatulah Kembali*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- _____, *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*, Bangil: Al Izzah, 1996
- Amaludin, Moh., *Polarisasi Sosial*, Jakarta: UI Press, 1987.
- An Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- An Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- _____, *Nizām Al-Ḥukm fī Al-Islām*, Cet. IV, Beirut: Dār Al-Ummah, 1996.
- _____, *Nizām Al-Islām*, Jakarta: Pustaka Tariq Al-'Izzah, 1993.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian-Sebuah Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Aṭ-Ṭawil, Nabil Subhi, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, penerjemah: Muhammad Baqir, Bandung: Mizan, 1985.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- De Vries, Egbert, *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Gilarso, T, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Islahi, A. A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Kian Wie, Thee (peny.), *Pembangunan Ekonomi dan Pémerataan, Beberapa Pendekatan Alternatif*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian unruk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1993.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Mubyarto, *Kemiskinan di Vietnam, Laos dan Kamboja*, Jakarta: Kantor Meko Ekoin, 1999.
- _____, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999.
- Mulder, Neils, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Peny, DH., *Kemiskinan Diantara Sistem Pasar*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Raharjo, M. Dawam, *Esei-esei Ekonomi Politik*, Jakarta : LP3ES, 1983
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rakhmat, Jalaludin, *Rekayasa Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999
- _____, *Kunci Surga Yang Terbuang*, Bandung: Mizan, 1985
- Rais, Amien, *Cakrawala Islam*, Bandung: Mizan, 1987
- Ramadhan, Syamsuddin, *Koreksi Total Sosialisme, Komunisme, Marhaenisme*, Bogor: Al Azhar Press, 2001

- Robert, Chamber, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang?*, Jakarta : LP3ES, 1987
- Sanusi, Ahmad, *Agama di Tengah Kemiskinan*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Setya, Awan (ed.), *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Soule, George, *Pemikiran-pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Sulaiman, Thahir Abd. Muhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 1983.
- Sumanto, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Suprpto, J., *Tekni Sampling*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Suyanto, Bagong, *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
- Swasono, Sri Edi (penyunting), *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, Jakarta: Univesitas Indonesia Press, 1999.
- Ul Haq, Mahbub, *Tirai Kemiskinan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1983.
- Vredenbergt, J., *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1979.
- Wijaya, Albert, *Budaya Politik dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Yusanto, Ismail, *Islam Ideologi*, Bangil: Al-Izzah, 1998.
- Zadjuli, Suroso Imam, *Anatomi Kemiskinan dan Perspektif Ekonomi*, Surabaya: tp. 1993.

_____, *Prospek dan Kendala Ekonomi Indonesia*, Surabaya: tp. 2001.

_____, *Mencari Mekanisme Ideal Pencabutan Subsidi BBM*, Surabaya: tp., 2001

_____, *Strategi Yang Tepat Untuk Mengembalikan Kepercayaan Negara-negara Sahabat Demi Memulihkan Perekonomian Indonesia Dengan Kebijakan Restrukturisasi Pembangunan Secara Total*, Surabaya: tp., 2001

Jurnal:

Al Wa'ie, No. 9 Tahun I, Mei 2001, Jakarta: Syabab Hizbut Tahrir.

_____, No. 10 Tahun I, Juni 2001, Jakarta: Syabab Hizbut Tahrir.

_____, No. 21 Tahun II, Mei 2002, Jakarta: Syabab Hizbut Tahrir.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

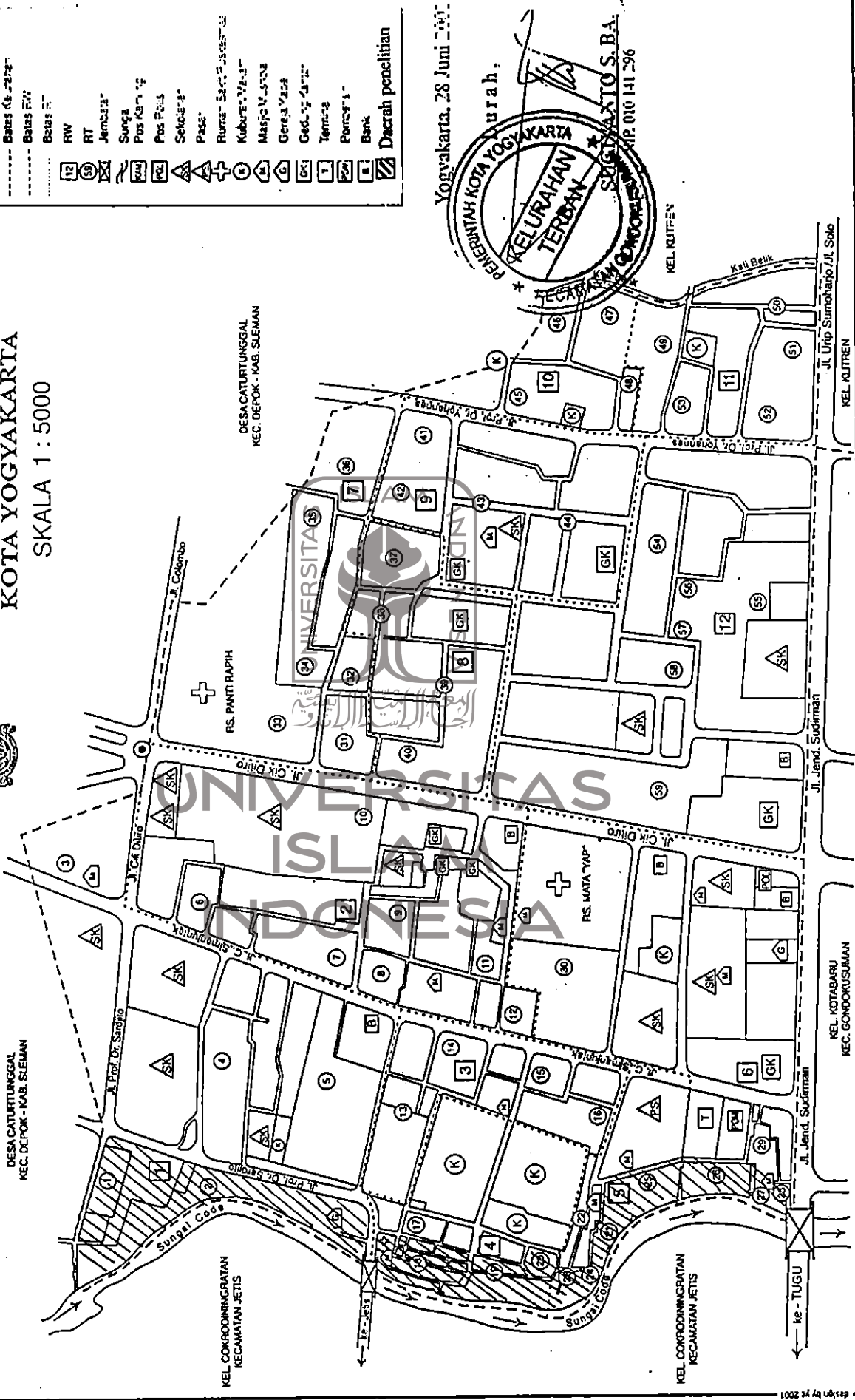


**PETA WILAYAH
KELURAHAN TERBAN
KECAMATAN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA**

SKALA 1 : 5000

LEGENDA

- Batas Kota/Kab.
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas RW
- Batas RT
- RT
- Jembatan
- Sungai
- Pos KEMRI
- Pos Polisi
- Sekolah
- Pasar
- Rumah Sakit
- Kuburan
- Masjid
- Gereja
- Gedung
- Taman
- Pondok
- Bank
- Daerah penelitian



Yogyakarta, 28 Juni 2007

Surah,
PENGURUS TERBAN
KELURAHAN TERBAN
KOTA YOGYAKARTA
SUGIANTO S. BA.
No. HP. 010 141 296

DESA CATURTINGGAL
KEC. DEPOK - KAB. SLEMAN

DESA CATURTINGGAL
KEC. DEPOK - KAB. SLEMAN

DESA CATURTINGGAL
KEC. DEPOK - KAB. SLEMAN

KEL. COKRODINGRATAN
KECAMATAN JETIS

KEL. COKRODINGRATAN
KECAMATAN JETIS

KEL. KOTABARU
KEC. GONDOKUSUMAN

KEL. KUTIPEN
Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Solo